



PEMERINTAH
KABUPATEN
DHARMASRAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**



[bapperida.dharmasrayakab..go.id](http://bapperida.dharmasrayakab.go.id)



[bapperidadharmasraya](https://www.instagram.com/bapperidadharmasraya)







EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dianggarkan pagu dana sebesar Rp. 4,321,239,481,- yang tertuang dalam DPA Perubahan Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, dengan realisasi Rp. 4,198,594,710,- atau 96,95%. Sedangkan anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4,304,109,691,- dengan realisasi Rp. 4,172,317,356.00,- atau 96.94% dan belanja modal sebesar Rp. 17,129,790,- terealisasi sebesar Rp. 17,121,454.00,- atau 99,95% yang didukung oleh personel sebanyak 29 orang pegawai.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2025, melaksanakan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan. Tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 juga sebagai tahun transisi periode Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025-2029. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengukuran terhadap 3 sasaran dan 7 indikator sasaran dengan capaian kinerja Bapperida sebesar 94,46%, mengindikasikan bahwa sebagian target kinerja belum tercapai optimal, dari sisi penggunaan anggaran tercatat tingkat efisiensi efisiensi sebesar -2,70%, yang mencerminkan anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya efisien, sehingga diperlukan penguatan dalam perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan agar alokasi anggaran dapat lebih selaras dengan optimal dengan *output* dan *outcome* yang dihasilkan.



Kedepan, optimalisasi efektifitas belanja dan fokus pada pencapaian indikator prioritas menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja sekaligus efisiensi anggaran berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan harapan dapat memberikan gambaran sejauh mana tolak ukur kegiatan serta akuntabilitas kinerja dan keuangan Bapperida Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan kegiatannya yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun disadari bahwa Laporan ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian, tetap diupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi, konsultasi dan asistensi dengan pihak-pihak terkait. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat terhadap peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pulau Punjung, 22 Maret 2026

PLA BAPPERIDA,



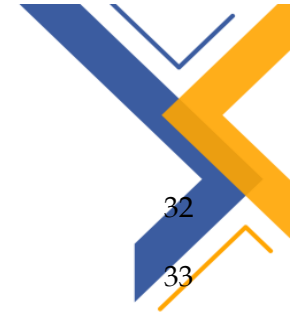
PLA DIST., M.Sc

205 200501 1 004



DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. STRUKTUR ORGANISASI	2
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	5
1.3. ISU STRATEGIS	6
1.4. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	
1.4.1 Sumber Daya Manusia	6
1.4.2 Sarana dan Prasarana	9
1.4.3 Anggaran	10
1.5. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2024	11
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. PERENCANAAN KINERJA	19
2.1.1. Visi dan Misi Bupati	19
2.1.2. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja PD	21
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	27
2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. METODELOGI PENGUKURAN KINERJA	31



3.2.	HASIL PENGUKURAN KINERJA	32
3.3.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	33
3.4.	REALISASI ANGGARAN	120
3.5.	INOVASI DAN PENGHARGAAN	123
BAB IV PENUTUP		
4.1.	KESIMPULAN	128
4.2.	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	129
LAMPIRAN		
1.	PERJANJIAN KINERJA	
2.	PENGUKURAN KINERJA	
3.	MONEV TRIWULAN 1,2,3 4	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025	7
Tabel 1.4.2.1	Daftar Inventaris Bapperida Tahun 2025	9
Tabel 1.4.3.1	Rekapitulasi Anggaran Bappeda Tahun 2025	10
Tabel 1.5.1.	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025	12
Tabel 2.1.1.1	Visi Misi RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.1.2.1	Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.1.3.1	Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Bapperida	28
Tabel 2.3.1	Anggaran Program dan Kegiatan Bapperida Tahun 2025	29
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	32
Tabel 3.2.1	Pengukuran Kinerja terhadap Target Tahun Kinerja 2025 Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3.3.1	Perbandingan Target Dengan Realisasi Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2025	34
Tabel 3.3.2	Rekapitulasi Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2025	35
Tabel 3.3.3	Perbandingan Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2021-2025	38
Tabel 3.3.4	Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2023-2025	38
Tabel 3.3.5	Sandingan Capaian Sasaran RPJMD dengan Capaian Akhir Renstra PD	41
Tabel 3.3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Capaian Sasaran RPJMD	43
Tabel 3.3.7	Rekapitulasi Usulan Musrenbang Kecamatan Per-SKPD Tahun 2024	40
Tabel 3.3.8	Perbandingan Target Dengan Realisasi Rata-rata Capaian Renstra PD Tahun 2025	50
Tabel 3.3.9	Rekapitulasi Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2025	50

Tabel 3.3.10	Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2023-2025	52
Tabel 3.3.11	Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2023-2025	52
Tabel 3.3.12	Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD dengan Target Akhir Renstra	55
Tabel 3.3.13	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Rata-Rata Capaian Sasaran Renstra PD	58
Tabel 3.3.14	Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025	60
Tabel 3.3.15	Rekapitulasi Rata-rata Capaian Kegiatan/subkegiatan OPD Tahun 2025	63
Tabel 3.3.16	Sandingan Capaian Rata-rata Capaian kegiatan/subkegiatan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	67
Tabel 3.3.17	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Rata-rata capaian Kegiatan/subkegiatan	70
Tabel 3.3.18	Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025	72
Tabel 3.3.19	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	73
Tabel 3.3.20	Perbandingan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Akhir Renstra	75
Tabel 3.3.21	Rencana Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya	78
Tabel 3.3.22	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	81
Tabel 3.3.23	Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2025	85
Tabel 3.3.24	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	84
Tabel 3.3.25	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dengan Target Akhir Renstra	87
Tabel 3.3.26	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	90
Tabel 3.3.27	Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah	942
Tabel 3.3.28	Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	95

Tabel 3.3.29	Daftar Inovasi Perangkat Daerah Penilaian Tahun 2025	96
Tabel 3.3.30	Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah Dengan Tahun Sebelumnya	103
Tabel 3.3.31	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Target Akhir Renstra	106
Tabel 3.3.32	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Inovasi Daerah	108
Tabel 3.3.33	Capaian Hasil penilaian AKIP Bappeda Tahun 2025	111
Tabel 3.3.34	Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Tahun 2025	111
Tabel 3.3.35	Perbandingan Capaian Hasil penilaian AKIP Bappeda Dengan Tahun Sebelumnya	112
Tabel 3.3.36	Perbandingan Komponen Penilaian AKIP Bapperida Dengan Tahun Sebelumnya	112
Tabel 3.3.37	Perbandingan Capaian Hasil Penilaian AKIP Bappeda dengan Target Akhir Renstra	115
Tabel 3.3.38	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Hasil Penilaian AKIP Bapperida	118
Tabel 3.3.38	Anggaran dan Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis Tahun 2025	121



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.4.1.1	Pegawai Bapperida Berdasarkan Golongan	8
Grafik 3.3.1	Perbandingan Capaian Rata-rata Kegiatan/Subkegiatan dengan Tahun Sebelumnya	66
Grafik 3.3.2	Sandingan Komponen SAKIP Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat	74
Grafik 3.3.3	Sandingan Capaian Komponen SAKIP Pengukuran Kinerja dengan Provinsi Sumatera Barat	87
Grafik 3.3.4	Sandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat	105
Grafik 3.3.5	Perbandingan AKIP Bapperida dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Lain	114



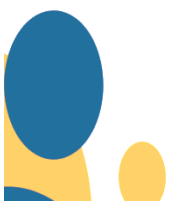
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.3.1	Monev dan Bimtek Inovasi Daerah	109
Gambar 3.5.1.1	Inovasi Jari Manis	125
Gambar 3.5.2.1	Piagam Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif	125
Gambar 3.5.2.2	Piagam Penghargaan Kabupaten Terbaik II Tingkat Kabupaten Se-Sumatera Barat	126



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I



PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari evaluasi semua rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wadah yang membantu mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi dalam merencanakan dan mengarahkan pembangunan daerah.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

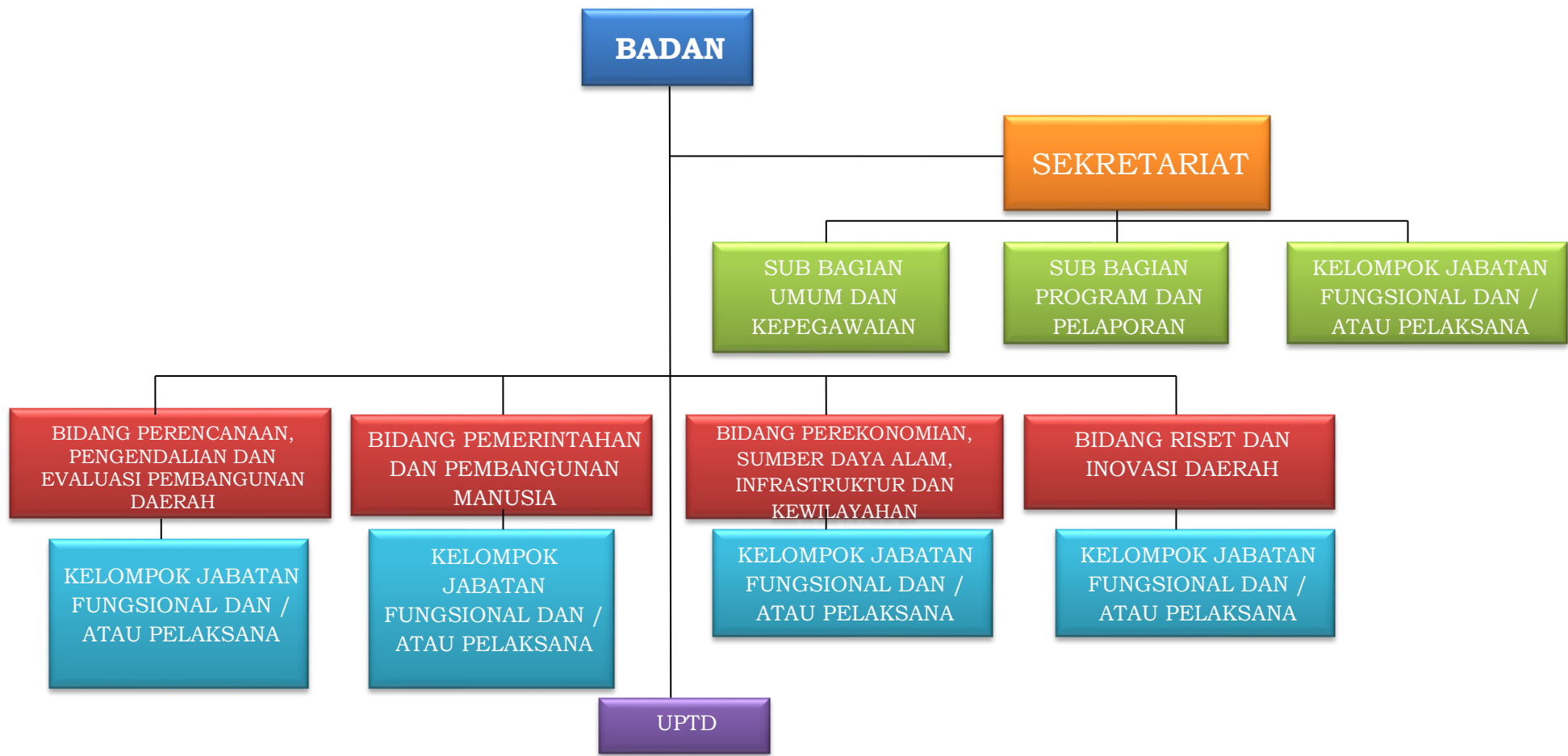
Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kab. Dharmasraya seiring dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengalami perubahan Nomenklatur dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappedda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Bapperida merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 
- 
1. Kepala Badan
 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Sub Bagian Program dan Pelaporan dan ;
 - 2.3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan/Pelaksana
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan/Pelaksana
 5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 5.1. Kelompok Kelompok Jabatan Fungsional dan/Pelaksana
 6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
 - 6.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan/Pelaksana

Struktur organisasi Bapperida sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2023 sebagaimana dalam gambar berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menetapkan bahwa Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta riset dan inovasi daerah.

Untuk melakukan tugas dan fungsi Bapperida, Bapperida mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, penelitian, pengembangan, pengkajian, pengendalian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi;
- b. Pelaksanaan fungsi dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan, bidang riset dan inovasi;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan, dikarenakan dampaknya bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Bapperida, yang apabila tidak segera diatasi maka akan menjadi masalah di kemudian hari, isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sinkronisasi antara perencanaan daerah, provinsi dan pusat
2. Peningkatan konsistensi perencanaan, anggaran dan pelaksanaan
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
4. Peningkatan pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
5. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan layanan
6. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir

1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA-PRASARANA DAN ANGGARAN

1.4.1. SUMBER DAYA MANUSIA (KESEDIAAN PEGAWAI)

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Bapperida merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja.

Dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.4.1.1

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2025**

No	Kategori Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Pegawai Tahun 2025				Jenis Kelamin		
		Jml	S2	S1	SMA	Jml	S2	S1	SMA	Jml	Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi											
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	√	√		1	1			1	1	
2	Jabatan Administrasi											
	1. Administrator	5	√	√		4	3	1		4	2	2
	2. Pengawas	2		√		1		1		1		1
	3. Pelaksana	31		√	√	12		10	2	12	4	8
3	Jabatan Fungsional											
	Perencana	14	√	√		7	2	5		7	4	3
	Peneliti	5	√	√		3	3			3	1	2
	Analisis Kebijakan	5	√	√		0				0		
	Penata Ruang	4	√	√		1		1		1		1
	Total Pegawai	67	0	0	0	29	9	18	2	29	12	17
	Jumlah Total Pegawai	67				29	9	18	2	29	12	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kab. Dharmasraya, Tahun 2026

Kondisi sumber daya manusia Bapperida berjumlah 29 orang pada tahun 2025 sedangkan untuk menjalankan tugas dan fungsi Bapperida secara ideal berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/450/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Analisa Jabatan khususnya pada Lampiran IV Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/450/KPTS-BUP/2022 dinyatakan bahwa Bapperida membutuhkan 67 pegawai, sehingga masih terdapat kesenjangan pemenuhan pegawai sebanyak 38 orang. Dengan rincian kekurangan pegawai pada jabatan administrator sebanyak 1 orang, jabatan pengawas 1 orang, jabatan fungsional perencana sebanyak 7 orang, peneliti sebanyak 2 orang, analisis kebijakan sebanyak 5 orang, dan penata ruang sebanyak 3 orang serta pelaksana sebanyak 19 orang.

Jumlah PNS di Bapperida pada umumnya dengan latar belakang pendidikan S1 sehingga diharapkan memberikan andil yang cukup signifikan

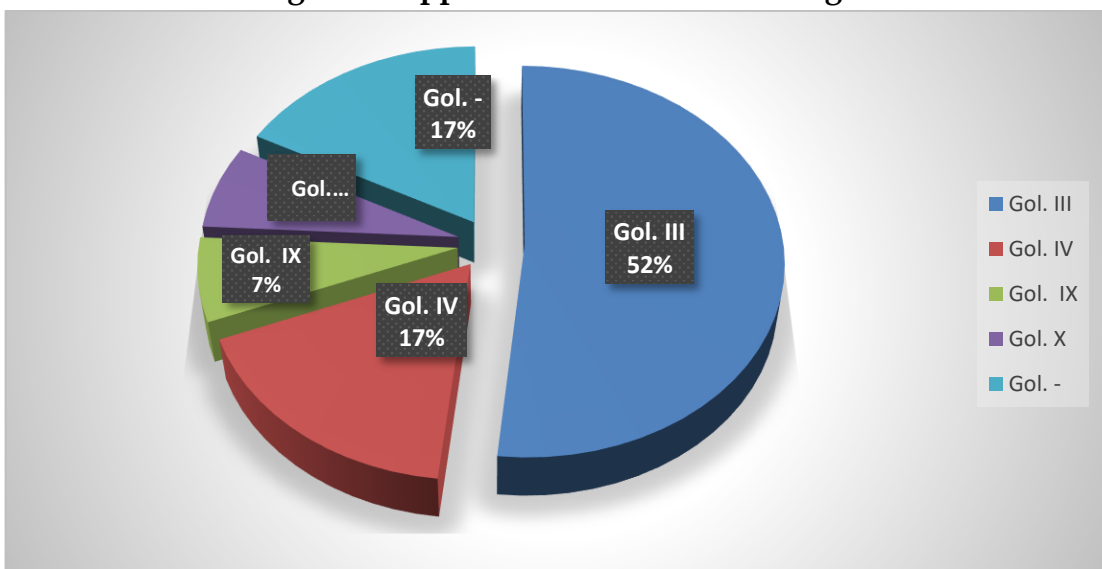
terhadap hasil perencanaan yaitu sebanyak 18 orang atau 62,1% berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi S2 sebanyak 9 orang atau 31,03% dan sisi pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 2 orang atau 6,90%.

komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, jumlah total sumber daya manusia berjenis kelamin perempuan lebih dominan, dengan jumlah pegawai perempuan PNS berjumlah 17 orang atau 58,62% dan pegawai laki-laki berjumlah 12 orang atau 41,38%. Pada jabatan pimpinan tinggi dan administrator seimbang antara dijabat oleh laki-laki dengan perempuan namun pada jabatan pengawas, jabatan fungsional hingga jabatan pelaksana rata-rata berjenis kelamin perempuan.

Dilain hal kekurangan komposisi pegawai PNS Bapperida disokong oleh pegawai Non PNS yang berstatus Tenaga Kontrak/*outsourcing* kontrak berjumlah sebanyak 6 orang. Komposisi tenaga *outsourcing* Bapperida berlatar belakang pendidikan SMU dan SLTP masing-masing sebesar 50 %, yang masing-masing berperan sebagai tenaga sopir, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Bapperida jika ditinjau dari golongan sebagai berikut:

Grafik 1.4.1.1
Pegawai Bapperida Berdasarkan Golongan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kab. Dharmasraya, Tahun 2026

Komposisi pegawai Bapperida berdasarkan golongan didominasi golongan yang memberikan kontribusi pada kinerja operasional dan pelaksanaan tugas harian yaitu Gol. III sebanyak 15 orang atau 52%, Gol. X 2 orang atau 7% Gol. IX 2 orang atau 7 % dan tanpa golongan (PPPK paruh waktu) 5 orang atau 17 % serta Gol. IV sebanyak 5 orang atau sebesar 17% yang berperan penting dalam mengarahkan visi dan strategi organisasi.

1.4.2. SARANA DAN PRASARANA

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Data sarana dan prasarana Bapperida dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4.2.1
Daftar Inventaris Bapperida Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah (unit)
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2
2	Sepeda Motor	Unit	8
3	Mesin Absensi	Unit	1
4	A.C. Window	Unit	8
5	A.C. Split	Unit	5
6	Televisi	Unit	1
7	Loudspeaker	Unit	2
8	Sound System	Unit	1
9	Camera Video	Buah	2
10	Dispenser	Unit	2
11	P.C Unit	Unit	13
12	Lap Top	Unit	9
13	Note Book	Unit	5
14	Tablet PC	Unit	1
15	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	3
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kab. Dharmasraya, Tahun 2026

Sebagian besar kondisi sarana prasarana Bapperida cukup memadai untuk menunjang kinerja, namun dari sisi gedung Bapperida masih berada pada gedung milik Sekretariat Daerah yang pemakaiannya diperuntukan pada 2 (dua) lantai dengan kapasitas gedung belum cukup memadai dalam menampung 35 orang pegawai begitupun dengan jumlah dan kapasitas ruang rapat, mengingat frekuensi koordinasi yang cukup tinggi dari setiap bidang.

1.4.3. ANGGARAN



Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida pada tahun 2025 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Dharmasraya.

Tabel 1.4.3.1
Rekapitulasi Anggaran Bapperida Tahun 2025

Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Kenaikan/ Penurunan	%
	Anggaran	Porsi Anggaran	Anggaran	Porsi Anggaran		
BELANJA OPERASI	5,340,412,350	97.51	4,304,109,691	99.60	(1,036,302,659)	-24.08
Belanja Pegawai	3,131,861,000	57.19	2,636,886,116	61.02	(494,974,884)	-18.77
Belanja Barang dan Jasa	2,208,551,350	40.33	1,667,223,575	38.58	(541,327,775)	-32.47
BELANJA MODAL	136,233,000	2.21	17,129,790	0.40	(119,103,210)	(2)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121,020,000	2.21	3,120,000	0.07	(117,900,000)	-3778.85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,213,000	0.28	14,009,790	0.32	(1,203,210)	-8.59
Total Anggaran	5,476,645,350	100	4,321,239,481	100	(1,155,405,869)	-26.74

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025, data diolah Bapperida Tahun 2026

Perubahan anggaran tahun 2025 alokasi anggaran Bapperida menurun 27.15% dari Rp. 5,476,645,350 ke Rp. 4,307,229,691,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 4,304,109,691,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2,636,886,116,- atau 61.22%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1,667,223,575,- atau 38.71% dan belanja modal sebesar Rp. 17,129,790,-. atau 0.07%.



Pada anggaran murni Bapperida Tahun 2025 persentase belanja barang dan jasa Bapperida sebesar 40.33%, jumlahnya relatif kecil terhadap Belanja Pegawai yang berada pada angka 57.19%, dikarenakan belanja pegawai meningkat sehubungan dengan diberlakukannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS, namun komposisi Perubahan Anggaran Tahun 2025 Bapperida menunjukkan persentase belanja pegawai naik 3.84 poin menjadi 61.02% sedangkan belanja barang dan jasa menurun 22.44 poin menjadi 38.58%, penurunan belanja barang jasa dikarenakan adanya efisiensi belanja dilingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya sesuai Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/1016/SE/BKD/XI-2025 Tentang Efisiensi Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

1.5. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2025

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Inspektorat No LAP-020/EV/Insp-2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.

Tabel 1.5.1.

Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

No	Rekomendasi Lhe 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8
PERENCANAAN KINERJA							
1	Disarankan menetapkan target yang menantang	<ul style="list-style-type: none"> - Koreksi target perjanjian kinerja tahun 2025 pada indikator AKIP Bapperida menjadi 86,96 - Sinkronisasi target dengan anggaran & SDM (<i>resource mapping</i>) - Kepala Bapperida melakukan rivi u konservatif terhadap rencana kerja yang disampaikan -Komitmen bersama atas target yang telah disepakati -Monitoring triwulan dan evaluasi strategi pencapaian target kinerja 	1 dokumen	Tahun 2025	Kepala Bapperida, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Pejabat Fungsional Perencana	Akan dilaksanakan tahun 2026	Ketidakterkaitan target dengan ketersediaan sumber daya
2	Membuat SOP Implementasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan tim penyusun sop dan kajian regulasi - Penguatan sistem pengukuran kinerja (validasi data) - Penyusunan Draft SOP dengan kreatifitas reward - Penetapan, sosialisasi dan edukasi implementasi SOP pada seluruh pegawai Bapperida - Implementasi, ujicoba tahap awal penilaian - Evaluasi dan revisi SOP 	1 SK/1 SOP	Tahun 2025	Kepala Bapperida, Sekretaris, Pejabat penilai kinerja	Akan dilaksanakan tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya SOP baku yang mengatur secara rinci pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait kinerja di lingkungan Kab. Dharmasraya - Kebijakan santun dimana pejabat struktural enggan memberikan sanksi kepada bawahan dikarenakan pertimbangan kedekatan kekeluargaan

No	Rekomendasi Lhe 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUKURAN KINERJA							
1	Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (<i>recofusing</i>) organisasi sehingga RKPD/Renja 2025 sudah didasarkan pada pengukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Riviu/audit kinerja menyeluruh tahun berjalan dengan mengidentifikasi indikator RKPD dan Renja OPD dan sinkronisasi dengan RPJMD dan IKU - Validasi baseline data 3-5 tahun terakhir - Penyesuaian peran dan fungsi pengendalian dan evaluasi pada masing-masing OPD -Pemetaan ulang program/kegiatan yang tidak mendukung sasaran dan pengautan program prioritas - Review konsistensi indikator pagu penganggaran berbasis output dan outcome - Evaluasi semesteran dan penyusunan rekomendasi perbaikan serta perbaikan Renja OPD berdasarkan rekomendasi - Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan indikator dan logframe per OPD 	4 Dokumen	Tahun 2026	Bapperida, BKPSDM, Inspektorat, seluruh OPD	Akan dilaksanakan tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada indikator OPD yang bersifat administratif sehingga recofusing hanya memindahkan anggaran belum sepenuhnya memperbaiki kebijakan - Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi -Implementasi sistem AKIP belum optimal dimana perencanaan, penganggaran dan pelaporan belum terintegrasi

No	Rekomendasi Lhe 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Membuat laporan monitoring evaluasi perTriwulan yang ditandatangani pimpinan	Membuat laporan monitoring evaluasi perTriwulan yang ditandatangani pimpinan	1 Laporan	Tahun 2025	Sekretaris	Sudah dilaksanakan	
PELAPORAN KINERJA							
1	Melakukan penyesuaian pada rencana kerja atau aktivitas yang sedang berjalan mencakup alokasi ulang sumber daya, perbaikan proses atau perubahan strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Realokasi anggaran ke kegiatan prioritas - Penyesuaian distribusi beban kerja SDM Bapperida - Optimalisasi pemanfaatan teknologi/sistem informasi - Penjadwalaan ulang kegiatan agar selaras dengan kapasitas riil -Penguatan monitoring dan evaluasi bulanan dan triwulan -Koordinasi intensif 	1 laporan	Tahun 2026	Kepala Bapperida	Akan dilaksanakan tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar realokasi anggaran belum didasarkan pada capaian kinerja riil - Keterbatasan kapasitas SDM - Belum terintegrasinya, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL							
1	Melakukan evaluasi secara berjenjang dan menuangkan kedalam dokumen sehingga dapat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan template evaluasi berjenjang dan pelaksanaan evaluasi berjenjang dari eselon IV hingga ess II - Pengelolaan & pengarsipan bukti dukung 	4 laporan	2025	Kepala Bapperida	Sudah dilaksanakan	

No	Rekomendasi Lhe 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Masalah
1	2	3	4	5	6	7	8
	dijadikan bukti dukung						
2	Menetapkan mekanisme untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan implementasi sistem pencatatan yang terintegrasi	- Penyusunan SK Penanggung jawab dan koordinator tindak lanjut rekomendasi - Rapat monitoring berkala	1 SK	Tahun 2026	Kepala Bapperida, Sekretaris dan Kepala Bidang	Akan dilaksanakan	

Sumber: Hasil LHE Inspektorat terhadap AKIP Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan pencapaian kinerja selama satu tahun, Sistematika penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah, dukungan sumberdaya serta tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan tentang Rencana Strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan pokok, rencana kinerja tahun pelaporan serta perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Perangkat Daerah.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah).

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



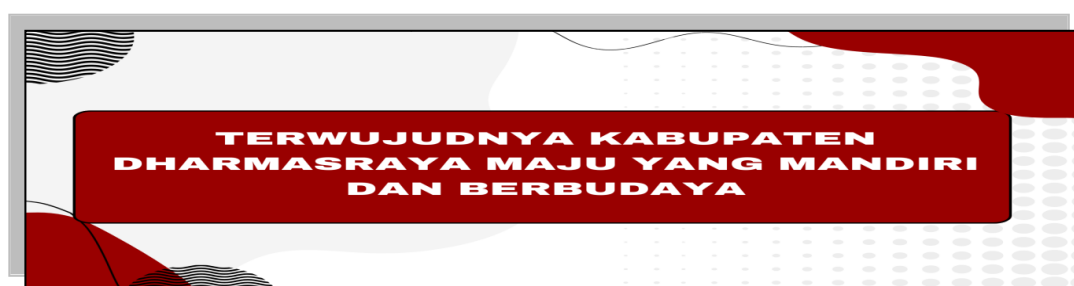
BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut:



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing;
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan;
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Visi dan Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1.1

Visi Misi RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026

Visi	Misi	Sasaran
Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah
		Mengurangi pengangguran
		Mengurangi kemiskinan
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang berkualitas
		Pelayanan publik yang prima
		Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup
	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	

Visi	Misi	Sasaran
	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
	agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat

Sumber : RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 serta sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan Bapperida maka fungsi dan tugas Bapperida terkait erat dengan pencapaian misi dan sasaran yaitu :



Misi 4 : “ Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien “

Sasaran : “ Birokrasi yang bersih dan akuntabel “

2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar



sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, and continuously improve (SMART-C)*.

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Bapperida Kab. Dharmasraya selama 5 tahun anggaran adalah : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih berkualitas.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.1

Tujuan dan Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi	Proyeksi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A	
		Nilai LPPD	Skor	3,538	3,600	3,650	3,7000	3,750	3,800	3,900	
S1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD	persen	103,37	90	90	90	95	95	95	
		Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	persen	-	90	90	90	95	95	95	
		Rata-rata capaian kegiatan/ subkegiatan	persen	97,21	90	90	90	95	95	95	
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	persen	19,35	20	22	23	24	25	26	
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	persen	16,48	18	19	20	21	22	23	
		Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	persen	10,56	12	13	14	15	16	17	
S2	Meningkatnya fungsi kelitbang dalam mendukung	Indeks Inovasi Daerah/ Indeks	indeks	3	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
				(48,07)	(65)	(70)	(72,5)	(75)	(80)		

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi	Proyeksi						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kebijakan dan pembangunan daerah	<i>Government Award</i>									
S3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bapperida	bobot/	BB	BB	BB	A	A	A	A	
			indeks	(73,82)	(79,40)	(79,92)	(80,44)	(80,96)	(81,48)	(82)	
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Bapperida	nilai	28,33	21,9	28,1	32,7	37,1	41,3	45,3	

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.1.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Proses perumusan penyusunan strategi dan arah kebijakan Bapperida berpedoman terhadap strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Renstra Bapperida Tahun 2021-2026. Selain mempedomani kedua dokumen perencanaan tersebut, perumusan strategi dan arah kebijakan juga mempedomani aturan perundang-undangan terkait serta hasil pengamatan terhadap hasil tinjauan lapangan. Strategi dan kebijakan Bapperida dituangkan dalam tabel 2.1.3.1. berikut ini :

Tabel 2.1.3.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Bapperida Tahun 2021-2026

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tatacara dan tahapan perencanaan
		meningkatkan ketersediaan, kualitas dan analisis data pembangunan
		peningkatan keselarasan perencanaan kabupaten dengan perencanaan provinsi, nasional dan daerah tetangga.
		meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan serta dokumen lainnya
		optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perencanaan daerah
		pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses perencanaan pembangunan
	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah melalui verifikasi rancangan Renstra PD dan Renja PD
	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan RKPD	
Meningkatnya fungsi kelitbangan dalam mendukung	mengoptimalkan hasil kelitbangan daerah dalam percepatan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan OPD, pihak terkait serta lembaga penelitian terhadap kajian penelitian pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pembangunan daerah	pembangunan daerah	Mengkoordinasi penciptaan inovasi, baik secara kuantitas dan kualitas di setiap perangkat daerah dan stakeholder pembangunan daerah
		Mengoptimalkan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi daerah
		penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan
Meningkatnya Kualitas Implementasi Rb dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (mental aparatur, Organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan pelayanan public - Monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tentang Reformasi Birokrasi - Pemberian Reward and Punnishment dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Penilaian tenaga teladan di Lembaga OPD
		<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kualitas perencanaan OPD 2. peningkatan kualitas evaluasi internal OPD 3. peningkatan kualitas indikator kinerja OPD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. peningkatan capaian kinerja OPD 5. peningkatan kualitas laporan kinerja OPD

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja atau sering juga disebut Penetapan Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun. PK merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya agar terus meningkatkan kinerjanya. PK juga berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 mengalami perubahan dimana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang sebelumnya dicantumkan sebagai salah satu indikator kinerja sasaran Renstra Bapperida tidak dicantumkan lagi dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan Tata Cara Evaluasi RB dari Kementerian PAN-RB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hal yang sama juga berlaku pada indikator Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja seiring berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terdapat perubahan bobot komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian AKIP, dengan evaluasi yang lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja sehingga indikator ini tidak dicantumkan lagi dalam perjanjian kinerja Bapperida.

Dilain hal guna menetapkan target kinerja yang lebih menantang, Bapperida melakukan koreksi target pada pencapaian target AKIP Bapperida dari 81,48 pada target Renstra menjadi 86,96 di target perjanjian kinerja, dengan disahkannya

Perubahan APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 juga turut mempengaruhi anggaran, sehingga Perjanjian Kinerja Bapperida adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD	95
		Rata-rata capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	95
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	95
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	22
2	Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/ <i>Indeks Government Award</i>	Sangat inovatif (75)
3	Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bapperida	A (81,40)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,314,499,225	DAU-APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	574,706,648	DAU-APBD
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	117,248,566	DAU-APBD
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	192,140,271	DAU-APBD
	Jumlah	4,198,594,710	DAU-APBD

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Anggaran Bapperida berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4,198,594,710,- dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Anggaran Program dan Kegiatan Bapperida Tahun 2025

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran
PERENCANAAN	4,006,454,439
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,314,499,225
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,627,422,128
Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,653,445
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331,520,294
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,903,358
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	574,706,648
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	572,456,648
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2,250,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20,823,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	356,178,600
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54,716,500
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	21,174,500
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	41,357,566
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	560,203,000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	192,140,271
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	179,711,871
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	12,428,400
JUMLAH TOTAL	4,198,594,710
Sumber : Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Bapperida Kab. Dharmasraya, Tahun 2025	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Dharmasraya tahun 2025.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja kepala dinas dengan Bupati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	>100%	Memuaskan
2	85% - 99.9%	Sangat Baik
3	75% - 84.9%	Baik
4	55% - 74.9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran target indikator dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1
Pengukuran Kinerja terhadap target tahun Kinerja 2025 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	%	Kategori
1	2	3	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian sasaran RPJMD	%	95	104.09	109.57	Memuaskan
		Capaian sasaran Renstra PD	%	95	93.98	98.93	Sangat Baik
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	95	83.78	88.19	Sangat Baik
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	%	25	22.85	91.40	Sangat Baik
		Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	%	22	19.54	88.82	Sangat Baik
2	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam Mendukung Kebijakan dan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah/ <i>Indeks Government Award</i>	Indeks	Sangat Inovatif 75	Sangat Inovatif 66.80	89.07	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kualitas	Hasil penilaian AKIP Bapperida	Peringkat	A	BB		Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			
				Target	Realisasi	%	Kategori
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			81.48	70.39	86.39	
Rata-Rata Kinerja Bapperida Tahun 2025						94.46	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Data diolah Bapperida Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Bapperida Tahun 2025 dengan 3 (tiga) sasaran dikatakan **sangat baik** dengan rata-rata capaian kinerja 94.46% hal ini dikarenakan masih adanya enam indikator sasaran yang belum mencapai target namun masih pada *range* kinerja capaian 85-99 alias kategori sangat baik dengan rata-rata capaian Renstra PD 98,93%, rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan dengan capaian 88,19%, nilai sakip komponen perencanaan kinerja sebesar 91,40% dan nilai sakip komponen pengukuran kinerja pada 88,82%, Indeks Inovasi Daerah/ *Indexs Government Award* sebesar 8,07% serta hasil penilaian AKIP Bappeda pada 86,39%.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. CAPAIAN SASARAN RPJMD

Sasaran RPJMD menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengukur tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 ,sehingga dapat dilihat sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian Sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 pada tahun 2025 merupakan kinerja tahun kelima dihitung berdasarkan pada pencapaian 18 (delapan belas) sasaran dan tiga puluh dua Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal di atas Bapperida sebagai Perangkat daerah yang bertugas sebagai *Leading* Sektor Perencanaan menerapkan pendekatan perencanaan *Money Follow Program* dengan Konsep “THIS” (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Dalam hal ini Bapperida mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan prioritas pembangunan daerah agar target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Dharmasraya rata-rata dapat tercapai.

Capaian keberhasilan kinerja untuk indikator dapat dilihat pada perhitungan dan tabel berikut :

Capaian Sasaran RPJMD =	Rata-rata capaian sasaran RPJMD
Capaian Indikator Kinerja =	104.09

1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.3.1

Perbandingan Target Dengan Realisasi Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1	Capaian sasaran RPJMD	%	95	104.09	109.57	Memuaskan

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Tahun 2026

Dari tabel diatas, pencapaian target untuk indikator capaian sasaran RPJMD telah telah melebihi target yang ditetapkan yaitu penetapan target sebesar 95% tercapai 104.09% dengan capaian indikator sasaran 109.57% dengan kategori predikat **memuaskan**.

Namun demikian, capaian tersebut perlu dicermati secara lebih mendalam, karena secara substansi merupakan hasil dari mekanisme agregasi antar indikator sasaran. Beberapa indikator dengan capaian yang sangat tinggi memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai rata-rata kinerja, sehingga mampu menutupi indikator lain yang realisasinya masih di bawah target. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan capaian antar sasaran, yang berpotensi mengaburkan gambaran kinerja riil pada beberapa aspek pembangunan. Hal ini senada sebagaimana ditunjukkan pada pencapaian indikator sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Capaian Indikator Pendukung
Capaian Sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2025			Capaian Sasaran	Kategori Capaian Sasaran
				Target Baru	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	60	54.88	91.47	95.46	Sangat Baik
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	92	89.79	97.60		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	95	92.45	97.32		
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	69.76	69.99	100.33	98.12	Sangat Baik
		Rasio pemukiman layak huni	Persen	90	86.32	95.91		

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2025			Capaian Sasaran	Kategori Capaian Sasaran
				Target Baru	Realisasi	Capaian		
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	80	93.26	116.57	116.57	Memuaskan
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74.5	74.34	99.79	99.79	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.98	9.31	103.67	102.34	Memuaskan
		Harapan lama sekolah	Tahun	12.89	13.02	101.01		
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89.5	89.71	100.23	100.23	Memuaskan
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	58.71	62.05	105.69	114.50	Memuaskan
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen	8.83	10.89	123.32		
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6	5.51	91.83	91.83	Sangat Baik
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.32	4.61	86.65	86.65	Sangat Baik
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	3.578	3.85	107.60	93.76	Sangat Baik
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot	WTP	DALAM PROSES (S/D MARET)	100.00		
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/Indeks	BB	67.42	96.31		
		Nilai LPPD	Skor	3.800	2.7029	71.13		
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	3.61	3.61	100.00	99.67	Sangat Baik
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	82.77	82.23	99.35		
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	3.3	4.25	128.79	117.30	Memuaskan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	89.94	105.81		
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	0.8651	0.8041	92.95	96.33	Sangat Baik
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks	0.7798	0.7582	97.23		
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks	0.7154	0.7068	98.80		
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	20	27.34	136.68	136.68	Memuaskan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2025			Capaian Sasaran	Kategori Capaian Sasaran
				Target Baru	Realisasi	Capaian		
	mewujudkan pembangunan berkelanjutan							
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66.47	72.89	109.66	109.66	Memuaskan
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	115	134.81	117.23	117.23	Memuaskan
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	20	20.48	102.39	96.43	Sangat Baik
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen	100	90.48	90.48		
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	2	2.00	100.00	100.00	Memuaskan
Jumlah Total						104.09		Memuaskan

Sumber : RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Seperti terlihat deviasi ketimpangan capaian yang mencolok terlihat pada "sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel" di indikator nilai LPPD menggunakan realisasi tahun 2023 dikarenakan realisasi tahun 2024 walaupun sudah dilakukan evaluasi oleh Tim Daerah dan Tim Nasional tetapi hasilnya belum diumumkan. Capaian atas indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Terjadi penurunan capaian yang menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya belum maksimal dalam penyusunan laporan, ini terlihat dari menurunnya nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang sebelumnya peringkat 9 menjadi peringkat 252 di tahun 2023 secara nasional.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian RPJMD Tahun 2020-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2021	95	104.55	110.05	↓	Memuaskan
2022	90	105.30	117.00	↑	Memuaskan
2023	90	104.09	115.66	↓	Memuaskan
2024	95	100.64	105.94	↓	Memuaskan
2025	95	104.09	109.57	↑	Memuaskan

Sumber : LAKIP Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2022-2024, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Pada Tabel 3.3.3 diatas terlihat capaian sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya lima tahun terakhir telah melebihi target yang yang telah ditetapkan dengan angka 110,05 % tahun 2021 meningkat 6,95 poin menjadi 117% tahun 2022 , menurun pada tahun 2023 ke angka 115.61% tahun 2023 dan 105.94% tahun 2024 dan menanjak lagi ke 113.71% tahun 2025.

Guna mengidentifikasi fluktuasi capaian dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dapat dilihat dari capaian masing-masing sasaran RPJMD periode tahun berkenaan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.4
Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2023-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	98.13	94.21	95.46
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen			
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen			
2	Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	113.24	97.07	98.12

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023	2024	2025
		Rasio pemukiman layak huni	Persen			
3	Meningkatnya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	100	91.11	116.57
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	100.51	102.78	99.79
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	101.52	102.38	102.34
		Harapan lama sekolah	Tahun			
6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	99.32	100.27	100.23
7	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	89.23	107.31	114.50
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	Persen			
8	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	87.07	86.42	91.83
9	Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	107.64	101.48	86.65
10	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	Indeks	97.23	96.80	93.76
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Bobot			
		Hasil evaluasi AKIP	Bobot/Indeks			
		Nilai LPPD	Skor			
11	Birokrasi yang berkualitas	Indeks SPBE	Indeks	100.57	121.50	99.67
		Indeks Profesionalisme ASN	Indeks			
12	Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	Indeks	103.63	100.18	117.30
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			
13	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	105.01	104.79	96.33
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	Indeks			
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	Indeks			
14	Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	77.4	108.70	136.68
15	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	96.99	99.68	109.66

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	2023	2024	2025
16	Optimalisasi penyelenggaraan Penanggulangan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana Daerah	Indeks	95.98	99.98	117.23
17	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	Persen	122.1	211.59	96.43
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	Persen			
18	Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	Nagari	50	66.67	100.00
Jumlah Total				104.09	100.64	104.09

Sumber : RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Sebagaimana tabel 3.3.4 diatas capaian sasaran RPJMD periode tiga tahun terakhir terkontraksi paling dalam tahun 2024, walaupun sasaran pendukung RPJMD yang mencapai target berhasil diraih 10 (sepuluh) sasaran pendukung RPJMD namun hal ini tidak mampu menutupi 8 (delapan) sasaran pendukung RPJMD yang tidak memenuhi target, sebagaimana diwarnai dengan warna biru. Sasaran pendukung RPJMD penyumbang kontraksi yang cukup dalam dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada indikator sasaran RPJMD jumlah nagari beradat dan berbudaya, yangmana penurunan capaian indikator sasaran ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Wali Nagari beserta pemangku adat 2 nagari dari 4 Nagari Target Percontohan Nagari Beradat dan Berbudaya tahun 2024 yaitu Nagari Padang Laweh dan Nagari IV Koto Pulau Punjung.

1.3 Perbandingan Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena ketidakterdediaan data dari Bapperida Provinsi Sumatera Barat dan Bapperida Kab/Kota lain sesuai *deadline* penyusunan LAKIP Bapperida Kab. Dharmasraya, sehingga indikator ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara.

1.4 Perbandingan Capaian dengan Target Akhir Renstra



Tabel 3.3.5
Sandangan Capaian sasaran RPJMD dengan Capaian Akhir Renstra PD

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Periode Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
		Target	Realisasi	%			
Capaian sasaran RPJMD	%	95	104.09	109.57	95	109.57	Memuaskan

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Jika dibandingkan capaian sasaran RPJMD tahun 2025 dengan target akhir Renstra, maka capaiannya telah mencapai 109.57% yang mengindikasikan bahwa secara agregat sasaran pembangunan daerah telah melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun secara umum kinerja sasaran RPJMD tergolong memuaskan, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap indikator-indikator sasaran yang belum mencapai target. Hal ini penting untuk memastikan pemerataan keberhasilan pembangunan dan meningkatkan



efektivitas intervensi kebijakan pada sektor-sektor yang masih tertinggal.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor pendorong keberhasilan indikator Ini adalah:

- a) Penetapan target sasaran melibatkan *stakeholder* PD terkait
- b) Rakor dan *desk* berkala setiap triwulan terhadap Renja PD;
- c) Fasilitasi dan komitmen semua PD dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor penghambat keberhasilan indikator ini:

- a) Keterbatasan kuantitas, kualitas ataupun kompetensi SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan penelitian dan pengembangan;
- b) Belum optimalnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dikarenakan perubahan dinamika perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat;
- c) Tingginya penetapan target IKU Daerah
- d) Perbedaan persepsi PD pengampu Indikator Daerah dalam memahami definisi operasional dan penghitungan indikator.

Upaya yang dilakukan guna mengatasi faktor penghambat diatas adalah melalui:

- a) Menganggarkan, mengagendakan dan melaksanakan pemenuhan jam diklat dan bimtek perencanaan secara berkelanjutan bagi SDM perencana dan SDM yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas, kompetensi SDM.
- b) Responsif menyikapi dinamika perubahan yang sangat cepat terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
- c) Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrument yang lebih operasional terkait kebijakan

pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD serta revaluasi kembali penetapan target IKU daerah ataupun IKU PD yang belum mencapai atau melebihi target.

- d) Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target ataupun sasaran.

1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100\%$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(693.907.900 * 109.57\%) - 691.955.214}{691.955.214} \times 100 = 9.85\%$$



Tabel 3.3.6

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Capaian Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Efisiensi	Keterangan
1	Capaian sasaran RPJMD	%	693,907,900.00	691,955,214.00	109.57	9.85	Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk mendukung pencapaian indikator Capaian Sasaran RPJMD Kab. Dharmasraya **efisien**. Bapperida berhasil melakukan efisiensi sebesar 9,85% dalam menggunakan anggaran



sebesar Rp. 693,907,900.00,- yang terealisasi sebesar 691,955,214.00 untuk mendukung pencapaian indikator sebesar 109,57%.

Faktor pendukung terjadinya efisiensi anggaran diantaranya upaya penyusunan program dan kegiatan yang telah mengacu pada prioritas RPJMD, sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah mengurangi duplikasi kegiatan dan meningkatkan efektifitas intervensi. Disatu sisi beberapa kontribusi indikator kinerja yang melebihi target memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian agregat sehingga kinerja keseluruhan meningkat tanpa membutuhkan tambahan anggaran yang besar. Selain itu pelaksanaan program dilakukan secara efektif melalui pengendalian biaya, efisiensi belanja operasional serta pemanfaatan aplikasi guna mendukung efektifitas kerja diantaranya SIPD Perencanaan, SIPD Penganggaran, SIPD Penatausahaan dan SIPD Pelaporan.

1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Untuk mendukung capaian kinerja indikator kinerja Capaian sasaran RPJMD didukung oleh dua program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan dilaksanakan melalui subkegiatan pelaksanaan musrenbang yaitu musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di 11 (sebelas) kecamatan tahun 2026 dan dan subkegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota berupa penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2026 dan



Perubahan RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025, yang berperan penting dalam memastikan keterpaduan antara prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Proses ini menjadi dasar landasan utama dalam menghasilkan perencanaan yang partisipatif, terarah dan akuntabel.



b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Analisis data merupakan alat utama untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026. Pada kegiatan analisis data Bapperida berperan sebagai koordinator Satu Data Indonesia (SDI). Dengan adanya kegiatan analisis data dengan penyediaan data diharapkan pemakaian data yang akurat, mutakhir dan terpadu yang mendorong ketepatan perumusan kebijakan serta meningkatkan kualitas intervensi program dalam mencapai sasaran RPJMD.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :



a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, merupakan koordinasi pada PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang berperan pada :

a) Peningkatan harapan hidup masyarakat dengan koordinasi di Dinas Kesehatan melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dilapangan melalui workshop, kordinasi lintas sektor terkait, dinas kesehatan Provinsi untuk proses izin operasional Labkesda, perbaikan sarana pelayanan kesehatan dilapangan. Melengkapi prasarana termasuk alat kesehatan sesuai standar, perbaikan sarana pelayanan kesehatan dilapangan dan melengkapi prasarana termasuk alat



kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sesuai standar.

- b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa SD dan SMP yang memiliki kompetensi khusus dalam minat dan bakatnya untuk berkompetisi mengikuti ajang perlombaan berjenjang sampai dengan tingkat nasional dengan metode seleksi dari tingkat bawah. Disamping itu pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan bangunan, gedung, dan sarana prasarana pendidikan, baik dengan optimalisasi Dana Alokasi Khusus/DAK yang berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), maupun yang bersumber dari APBD untuk semua jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- c) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga Bencana Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- d) Mengurangi pengangguran melalui melalui koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. Guna meningkatkan persentase angkatan kerja dan pencari kerja dalam mengasah keterampilan dan memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing pelatihan pada penduduk usia produktivitas kerja



ataupun informasi bursa kerjanya. Serta program penempatan tenaga kerja dengan kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online.

- e) Pencapaian target penurunan kemiskinan melalui penguatan Bapperida sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Dharmasraya, pemutakhiran data masyarakat miskin agar pemberian bantuan masyarakat miskin tepat sasaran (perlindungan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, infrastruktur permukiman) peningkatan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat.
- f) Birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui koordinasi dengan Sekretariat Daerah, Inspektorat dalam penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, penyelenggaraan pengawasan internal.
- g) Peningkatan Pelayanan publik yang prima dengan pengukuran kinerja indeks kepuasan masyarakat pada program penelitian dan pengembangan daerah fokus pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan.
- h) Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan melakukan update data lewat aplikasi idm yang dilakukan oleh operator idm pada nagari masing-masing yang didampingi oleh pendamping lokal desa (PLD). Kemudian verifikasi inputan pada IDM di tingkat kecamatan yang didampingi oleh Pendamping Desa (PD), dilanjutkan verifikasi data IDM oleh Dinas PMD yang didampingi oleh Tenaga Ahli Kabupaten.



- i) Peningkatan nilai-nilai agama adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah melalui koordinasi dengan bagian kesra pada program edukasi zakat, program pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.
 - j) Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan program pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, program pembinaan lembaga adat.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) merupakan koordinasi pada PD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam yang berperan dalam :
- a) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah melalui koordinasi dengan Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Kumperdag, Dinas Pertanian dalam hal Pengelolaan pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha mikro, penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, pelaksanaan penyuluhan pertanian.
 - b) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup dengan bekerja sama dengan laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan koordinasi dengan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berperan dalam :
- a) Peningkatan kualitas infrastruktur, perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal meningkatkan dan mempertahankan



kondisi jalan Kab. Dharmasraya dan fasilitasi peningkatan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak serta akses layanan sanitasi yang layak melalui penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja dan rehabilitasi sarana dan prasarana IPLT. Disamping itu koordinasi dengan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan dalam upaya pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.

- b) Peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
- c) Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang dan penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagai upaya peningkatan persentase pemanfaatan ruang dalam rangka pemanfaatan tanah negara, termasuk pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya.

2. RATA-RATA CAPAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran perangkat daerah merujuk pada tujuan atau target spesifik yang ditetapkan oleh suatu instansi atau unit kerja di dalam suatu pemerintahan daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Sedangkan rata-rata capaian sasaran Perangkat Daerah bertujuan untuk

memberikan gambaran keseluruhan sejauh mana keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan kata lain rata-rata capaian sasaran Perangkat Daerah memberikan gambaran yang komprehensif dan terukur tentang kinerja keseluruhan perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kinerja untuk indikator dapat dilihat pada perhitungan dan tabel berikut :

Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD =	Rata-rata Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Capaian Indikator Kinerja =	93.98

2.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.3.8
Perbandingan Target Dengan Realisasi Rata-rata Capaian Renstra PD Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			
			Target	Realisasi	%	Kategori
2	Rata-rata capaian Renstra PD	%	95	93.98	98.93	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Dari tabel diatas, pencapaian target untuk indikator rata-rata capaian sasaran Renstra PD belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95%, realisasi hanya tercapai tercapai 93.98% dengan capaian indikator 98,93% pada kategori predikat **sangat baik**. Capaian ini dipengaruhi capaian Renstra pada 37 OPD sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.9
Rekapitulasi Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	2025	Kategori Capaian
1	Dinas Pendidikan	88.37	Sangat Baik
2	Dinas Kesehatan	106.02	Memuaskan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	84.78	Sangat Baik
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan	92.57	Sangat Baik
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	100.00	Memuaskan
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.25	Sangat Baik
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	70.57	Cukup
8	Dinas Pangan Dan Perikanan	89.13	Sangat Baik
9	Dinas Lingkungan Hidup	95.32	Sangat Baik
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	78.78	Sangat Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari	100.96	Memuaskan
12	Dinas Perhubungan	71.02	Cukup
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	107.35	Memuaskan
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Perdagangan	99.75	Sangat Baik
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	148.40	Memuaskan
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga	94.22	Sangat Baik
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	98.80	Sangat Baik
18	Dinas Pertanian	93.97	Sangat Baik
19	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	87.24	Sangat Baik
20	Sekretariat Daerah	92.86	Sangat Baik
21	Sekretariat Dprd	93.71	Sangat Baik
22	Inspektorat Kabupaten	98.36	Sangat Baik
23	Kesbangpol	93.51	Sangat Baik
24	Bapperida	93.58	Sangat Baik
25	Badan Keuangan Daerah	96.26	Sangat Baik
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.43	Memuaskan
27	Kecamatan Pulau Punjung	89.50	Sangat Baik
28	Kecamatan Sitiung	85.54	Sangat Baik
29	Kecamatan Koto Baru	123.47	Memuaskan
30	Kecamatan Sungai Rumbai	94.33	Sangat Baik
31	Kecamatan Sembilan Koto	94.11	Sangat Baik
32	Kecamatan Timpeh	91.43	Sangat Baik
33	Kecamatan Koto Salak	67.09	Cukup
34	Kecamatan Asam Jujuhan	95.50	Sangat Baik
35	Kecamatan Koto Besar	94.20	Sangat Baik
36	Kecamatan Padang Laweh	92.35	Sangat Baik

No	Perangkat Daerah	2025	Kategori Capaian
37	Kecamatan Tiumang	97.65	Sangat Baik
	Jumlah	93.98	

Sumber : Data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Berdasarkan tabel 3.3.9 diatas jika ditinjau dari pencapaian indikator sasaran renstra perangkat daerah terhadap target yang telah ditetapkan perangkat daerah masing-masing maka hanya tiga perangkat daerah Kab. Dharmasraya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Koto Salak yang memiliki deviasi capaian mencolok terhadap perangkat daerah lain.

2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.10
Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2021	90	165.06	183.40	↑	Memuaskan
2022	90	135.68	150.76	↓	Memuaskan
2023	90	102.70	114.11	↓	Memuaskan
2024	95	102.21	107.59	↓	Memuaskan
2025	95	93.98	98.93	↓	Sangat Baik

Sumber : LAKIP Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2023-204, Data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Rata-rata capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD) menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Jika periode 2021-2024 capaian masih berada pada kategori memuaskan dengan capaian 183,40% tahun 2021 dan 107,59% Tahun 2024 maka memasuki tahun 2025 terjadi penurunan yang signifikan dengan kategori capaian sangat baik sebesar 98,93%. Lebih jelasnya penurunan capaian sasaran Renstra pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat dari tabel capaian sasaran Renstra pada 37 (tiga puluh tujuh) perangkat daerah Kab. Dharmasraya berikut :

Tabel 3.3.11
Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD Tahun 2023-2025

No	Perangkat Daerah	2023	2024	2025	Pertumbuhan
1	Dinas Pendidikan	90.13	89.82	88.37	-11.63
2	Dinas Kesehatan	170.1	116.83	106.02	6.02
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	329.74	100.19	84.78	-15.22
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan	88.06	100.19	92.57	-7.43
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	100	98.95	100	0
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	97.16	76.25	-23.75
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana	99.7	98.95	70.57	-29.43
8	Dinas Pangan Dan Perikanan	83.68	105.37	89.13	-10.87
9	Dinas Lingkungan Hidup	140.36	91.65	95.32	-4.68
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	99.77	94.33	78.78	-21.22
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari	107.07	206.42	100.96	0.96
12	Dinas Perhubungan	82.26	79.96	71.02	-28.98
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	109.53	99.97	107.35	7.35
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Dan Perdagangan	116.23	120.25	99.75	-0.25
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	213.67	78.79	148.4	48.4
16	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga	100.27	132.55	94.22	-5.78
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	104.29	111.44	98.8	-1.2
18	Dinas Pertanian	103.75	112.32	93.97	-6.03
19	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	217.55	103.43	87.24	-12.76
20	Sekretariat Daerah	106.95	102.02	92.86	-7.14
21	Sekretariat Dprd	98.98	93.99	93.71	-6.29
22	Inspektorat Kabupaten	99.9	98.36	98.36	-1.64
23	Kesbangpol	59.45	93.86	93.51	-6.49
24	Bapperida	101.55	100.74	93.58	-6.42
25	Badan Keuangan Daerah	104.92	36.35	96.26	-3.74
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	114.61	114.23	100.43	0.43
27	Kecamatan Pulau Punjung	100	87.97	89.5	-10.5
28	Kecamatan Sitiung	94.42	106.76	85.54	-14.46
29	Kecamatan Koto Baru	104.86	102.73	123.47	23.47
30	Kecamatan Sungai Rumbai	106.53	102.98	94.33	-5.67
31	Kecamatan Sembilan Koto	96.75	96.08	94.11	-5.89
32	Kecamatan Timpeh	97.35	99.05	91.43	-8.57
33	Kecamatan Koto Salak	115.38	117.21	67.09	-32.91

No	Perangkat Daerah	2023	2024	2025	Pertumbuhan
34	Kecamatan Asam Jujuhan	100	89.16	95.5	-4.5
35	Kecamatan Koto Besar	109.97	103.36	94.2	-5.8
36	Kecamatan Padang Laweh	100	98.33	92.35	-7.65
37	Kecamatan Tiumang	100	100	97.65	-2.35
Rata-rata Capaian Renstra PD		102.7	102.21	93.98	

Sumber : Data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Secara rinci 83,8% (31 perangkat daerah) dari 37 perangkat daerah pendukung indikator sasaran menunjukkan perlambatan pencapaian dan bahkan gagal memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini berdampak signifikan pada rekapitulasi kinerja keseluruhan, sejumlah PD yang sebelumnya mampu berada pada kategori kinerja "memuaskan" mengalami penurunan kategori kualitas capaian sehingga hanya mampu bertahan pada kategori "sangat baik" bahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan Koto Salak menurun tajam menjadi kategori baik dan cukup dengan capaian masing-masing 76,25% dan 67,09%.

Penurunan tren ini tidak terlepas dari rigiditas target Renstra terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Asumsi-asumsi makro yang digunakan pada awal perencanaan tahun 2021 tidak sepenuhnya mampu beradaptasi dengan tantangan realitas di tahun-tahun berikutnya, berupa keterbatasan fiskal daerah, inflasi biaya, dan prioritas nasional yang berubah / *shifting priority*. Akibatnya, beban target kinerja yang tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas realisasi yang memadai, menyebabkan sebagian besar indikator pada 37 OPD tersebut mengalami *undershoot*.

2.3 Perbandingan Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa

diperbandingkan karena perbedaan data IKU dan ketidakterediaan data Bappeda Kabupaten/Kota ataupun Bappeda Provinsi sesuai *deadline* LKJiP Bapperida Kab. Dharmasraya sehingga indikator ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara.

2.4 Perbandingan Capaian dengan Target Akhir Renstra

. Tabel 3.3.12
Perbandingan Rata-rata Capaian Sasaran Renstra PD dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Periode Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
			Target	Realisasi	%			
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	%	95	93.98	98.93	95	98.93	Sangat Baik



Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Secara kuantitatif, selisih antara target dan realisasi sebesar 1,02% dengan deviasi negatif tipis, mengindikasikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sangat efektif dan hampir seluruh sasaran strategis tercapai sesuai rencana. Kategori pencapaian 98,93% ini menunjukkan performa "sangat baik", di mana Bapperida sebagai koordinator pembangunan telah berhasil menjaga konsistensi kinerja OPD di tengah dinamika pelaksanaan selama lima tahun. Deviasi yang minim ini juga mencerminkan kualitas perencanaan yang realistis dan akuntabel, meskipun terdapat tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun-tahun terakhir periode.

2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor pendorong keberhasilan indikator Ini adalah:

- a) Penetapan target sasaran melibatkan *stakeholder* PD terkait.
- b) Rakor dan desk berkala setiap triwulan terhadap Renja PD.

- 
- 
- c) Fasilitasi dan komitmen semua PD dalam mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat keberhasilan indikator ini:

- a) Keterbatasan kuantitas, kualitas ataupun kompetensi SDM dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan penelitian dan pengembangan.
- b) Belum optimalnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dikarenakan perubahan dinamika perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat.
- c) Tingginya penetapan target IKU Daerah.
- d) Perbedaan persepsi PD pengampu Indikator Daerah dalam memahami definisi operasional dan penghitungan indikator.

Upaya yang dilakukan guna mengatasi faktor penghambat diatas adalah melalui:

- 1) Menganggarkan, mengagendakan dan melaksanakan pemenuhan jam diklat dan bimtek perencanaan secara berkelanjutan bagi SDM perencana dan SDM yang terkait. Sebagaimana terlihat pada cascading (crosscutting) Bapperida dengan BKPSDM (dana BKPSDM untuk bimtek/diklat) dalam upaya peningkatan kualitas, kompetensi SDM.
- 2) Responsif menyikapi dinamika perubahan yang sangat cepat terhadap regulasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran daerah dan menyiapkan instrument yang lebih operasional terkait kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD serta reuiu kembali penetapan target IKU daerah ataupun IKU PD yang belum mencapai atau melebihi target.
- 4) Melakukan pengendalian dan evaluasi secara terhadap pencapaian target ataupun sasaran.

2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Secara agregat, rata-rata capaian Renstra PD tahun 2025 sebesar 93,98% terhadap target 95% (tingkat pencapaian 98,93%) mengindikasikan bahwa secara total, penggunaan SDM Perangkat Daerah masih berada pada kategori efisien.

Namun, jika dianalisis secara distributif sebaran per OPD, terjadi inefisiensi alokasi kapasitas SDM yang signifikan. Data yang menunjukkan hanya 18,9% PD yang mencapai target dengan kategori "memuaskan" mengindikasikan bahwa mayoritas SDM di OPD lainnya bekerja di bawah kapasitas maksimalnya. Dominasi kategori "sangat baik" sebesar 70,3% mencerminkan fenomena "stagnasi produktivitas",

Keberadaan 10,8% PD yang berada pada kategori "cukup" dan "baik" menjadi indikator kuat adanya ketidakefisienan SDM struktural. Pada PD kategori ini, input SDM yang tersedia tidak sepenuhnya terkonversi menjadi output kinerja. Ini bisa terjadi karena *mismatch* kompetensi, beban kerja yang tidak merata, atau leadership yang lemah dalam mengelola tim, sehingga potensi SDM terbuang percuma.

b. Efisiensi anggaran

Keberadaan 10,8% PD yang berada pada kategori "cukup" dan "baik" menjadi indikator kuat adanya ketidakefisienan SDM struktural. Pada PD kategori ini, input SDM yang tersedia tidak sepenuhnya terkonversi menjadi output kinerja. Ini bisa terjadi karena *mismatch* kompetensi, beban kerja yang tidak merata, atau leadership yang lemah dalam mengelola tim, sehingga potensi SDM terbuang percuma.

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang

dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100\%$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%

Tabel 3.3.13
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran
Rata-Rata Capaian Sasaran Renstra PD

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Efisiensi	Ket
2	Rata-rata capaian Renstra PD	%	693,907,900.00	691,955,214.00	98.93%	-0.79	Tidak Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran sebesar Rp691.955.214,- dari pagu yang tersedia Rp693.907.900,- dengan tingkat penyerapan 99,72%, terlihat bahwa pengeluaran biaya/input hampir terealisasi penuh. Namun, capaian kinerja yang terealisasi sebesar 98,93% menunjukkan bahwa output yang dihasilkan tidak sebanding penuh dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Hal ini menghasilkan rasio efisiensi sebesar -0,79%, yang secara teknis mengindikasikan terjadinya inefisiensi biaya marjinal.

Dengan Pengeluaran anggaran yang mendekati 100% sementara kinerja "stuck" di angka 98,93% menunjukkan adanya komponen biaya yang berjalan atau biaya operasional yang terpakai digunakan namun tidak mampu mendorong penyelesaian sisa target kinerja sebesar 1,07%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengendalian anggaran berdasarkan progres fisik belum berjalan ketat.

2.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Untuk mendukung capaian kinerja indikator kinerja Capaian sasaran RPJMD didukung oleh dua program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan (2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :



Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di 11 (sebelas) kecamatan tahun 2025 dan pelaksanaan musrenbang RKPD dikabupaten tahun 2026 sebagai sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat agar menghasilkan perencanaan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hasil musrenbang kecamatan/kabupaten berupa usulan seperti tabel diatas, selanjutnya akan diakomodir sesuai kewenangan Perangkat Daerah terkait dan akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2026 yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam RPJMD Kab. Dharmasraya tahun 2021-2026 sehingga memperkuat relevansi antara kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah merupakan elemen kunci guna memastikan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 mendukung pencapaian sasaran Perangkat Daerah yaitu Renstra



Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Dharmasraya tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 dapat dicapai secara efektif.

- c. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Analisis data merupakan alat utama untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran termasuk capaian rata-rata Renstra PD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026. Pada kegiatan analisis data Bapperida berperan sebagai koordinator Satu Data Indonesia (SDI). Dengan adanya SDI diharapkan pemakaian data yang akurat, mutakhir dan terpadu pada penyusunan dokumen perencanaan ataupun untuk mengukur atau mengevaluasi perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan. Namun lambatnya produsen data dalam memutakhirkan data merupakan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- d. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi untuk mengukur program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran Renstra PD. Pada kegiatan ini kinerja OPD diukur berdasarkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RKPD melalui Evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara berkala (triwulan) melalui forum koordinasi dan laporan monev antar PD dan pemerintah daerah untuk menilai pencapaian sasaran selain itu pelaporan juga dikirimkan pada Bappeda Provinsi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) merupakan koordinasi pada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bapperida bidang PPM berperan dalam peningkatan rata-rata capaian sasaran Renstra PD lingkup bidang PPM melalui rapat-rapat koordinasi, pembuatan kebijakan, penguatan data, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah terkait, verifikasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan sinkronisasi serta sinergitas koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) merupakan koordinasi pada PD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Bapperida Bidang Perekonomian dan SDA berperan dalam peningkatan rata-rata capaian sasaran Renstra PD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA melalui rapat-rapat koordinasi, pembuatan kebijakan, penguatan data, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah terkait, verifikasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Bidang Perekonomian dan SDA, penyusunan dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dan sinkronisasi serta sinergitas koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- d. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Merupakan koordinasi pada PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bapperida Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berperan dalam peningkatan rata-rata capaian sasaran Renstra PD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melalui rapat-rapat koordinasi, pembuatan kebijakan, penguatan data, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah terkait, verifikasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, penyusunan dokumen perencanaan bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan sinkronisasi serta sinergitas koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

3. RATA-RATA CAPAIAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Rata-rata capaian kegiatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja dan pencapaian dalam suatu program. Dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah realisasi didapatkan dari monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Bapperida per triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berkenan. Metode evaluasi menggunakan persentase antara target keuangan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan realisasi anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dievaluasi tahun 2025 triwulan I hingga tiwulan IV, lebih jelasnya rumus penghitungan digambarkan dalam tabel berikut :

Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan =	$\frac{\text{Realisasi Anggaran RKPD Kabupaten yang dievaluasi tahun 2025}}{\text{Target Anggaran RKPD}} \times 100\%$
Capaian Indikator Kinerja =	$\frac{865,714,315,790}{1,033,300,325,635} \times 100\% = 83.78\%$

3.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3.14
Rata-rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Kategori
			Target	Realisasi	%	
3	Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	95	83.78	88.19	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026, data diolah Tahun 2026

Target indikator rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan tahun 2025 adalah 95% dan terealisasi 83.78% dengan capaian 88.19% pada kategori sangat baik. Pencapaian kinerja atas indikator rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan ini belum mencapai kategori memuaskan yang ditetapkan dikarenakan pagu anggaran kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan diRKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 lebih tinggi dari pada pagu anggaran kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan pada DPA Tahun 2025 OPD, terkait hal ini menjadikan tingginya deviasi antara pagu anggaran kegiatan/subkegiatan RKPD Tahun 2025 Kab. Dharmasraya dengan pagu anggaran kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan pada DPA OPD. Tingginya tingkat ketimpangan ini pada akhirnya menjadikan capaian kinerja kegiatan/subkegiatan OPD Tahun 2025 tidak optimal bahkan tidak memenuhi target. Berikut ditampilkan rekapitulasi rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan Perangkat Daerah tahun 2025:

Tabel 3.3.15
Rekapitulasi Rata-rata Capaian Kegiatan/subkegiatan OPD Tahun 2025

No	OPD	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi tahun 2025	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2025 (RKPD)	Kategori
1	Dinas Pendidikan	324,910,609,957	307,064,046,216	94.51	Sangat Baik

No	OPD	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi tahun 2025	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2025 (RKPD)	Kategori
2	Dinas Kesehatan	270,070,537,572	171,395,228,344	63.46	Cukup
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	36,842,626,180	22,343,109,992	60.64	Cukup
4	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan	6,558,433,009	5,798,241,675	88.41	Sangat Baik
5	Satuan Polisi dan Damkar	8,565,993,600	8,069,744,769	94.21	Sangat Baik
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,495,350,350	3,087,076,779	88.32	Baik
7	Dinas Sosial P3APKB	20,582,703,420	38,938,173,506	189.18	Sangat Baik
8	Dinas Pangan dan Perikanan	7,845,520,590	6,089,815,613	77.62	Baik
9	Dinas Lingkungan Hidup	7,130,890,415	9,072,302,703	127.23	Memuaskan
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,144,054,435	2,460,471,811	59.37	Cukup
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,926,768,740	4,088,126,757	82.98	Baik
12	Dinas Perhubungan	21,644,453,238	14,094,943,771	65.12	Cukup
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,787,120,400	5,736,859,760	99.13	Sangat Baik
14	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan	4,599,131,787	2,580,248,369	56.10	Cukup
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,326,893,210	2,786,026,819	83.74	Baik
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	10,928,770,798	7,917,719,038	72.45	Baik
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3,623,215,245	3,281,377,280	90.57	Sangat Baik
18	Dinas Pertanian	20,183,488,645	15,098,049,542	74.80	Cukup
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,581,484,110	8,285,835,510	148.45	Memuaskan
20	Sekretariat Daerah	35,697,872,579	27,165,183,100	76.10	Baik
21	Sekretariat Dewan	43,341,492,350	37,837,623,489	87.30	Sangat Baik
22	Badan Perencanaan Penelitian dan	4,794,496,350	3,956,438,161	82.52	Baik

No	OPD	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi tahun 2025	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2025 (RKPD)	Kategori
	Pengembangan Daerah				
23	Badan Keuangan Daerah	141,645,349,615	127,465,614,195	89.99	Sangat Baik
24	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia	5,838,989,750	5,044,035,453	86.39	Sangat Baik
25	Inspektorat Kabupaten	7,489,221,150	5,989,421,266	79.97	Baik
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4,039,516,635	3,742,692,986	92.65	Sangat Baik
27	Kec. Pulau Punjung	2,431,760,475	2,057,592,411	84.61	Baik
28	Kec. Sitiung	2,197,031,400	1,856,451,012	84.50	Baik
29	Kec. Koto Baru	2,140,253,230	1,798,290,975	84.02	Baik
30	Kec. Sungai Rumbai	1,764,291,300	1,573,309,107	89.18	Sangat Baik
31	Kec. Sembilan Koto	1,584,990,650	1,135,572,478	71.65	Baik
32	Kec. Timpeh	1,509,668,350	881,650,947	58.40	Cukup
33	Kec. Koto Salak	1,559,838,600	1,171,352,708	75.09	Baik
34	Kec. Asam Jujuhan	1,316,660,800	1,385,369,771	105.22	Memuaskan
35	Kec. Koto Besar	2,137,501,500	1,796,320,393	84.04	Baik
36	Kec. Padang Laweh	1,461,257,600	1,389,625,208	95.10	Sangat Baik
37	Kec. Tiumang	1,602,087,600	1,280,373,876	79.92	Baik
Jumlah Total		1,033,300,325,635	865,714,315,790	83.78	Baik

Sumber : Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Seperti terlihat dari rekapitulasi rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan Tahun 2025 diatas, tergambar bahwa hanya 8% atau 3 OPD dengan kategori memuaskan, 32% atau 12 OPD pada kategori sangat baik, pada kategori baik sebanyak 41% atau 15 OPD, selanjutnya pada kategori cukup sebanyak 19% atau 7 OPD. Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat hanya 3 OPD yang melebihi target kinerja yang ditetapkan, sehingga hal ini berpengaruh pada pencapaian kinerja rata-rata kegiatan/subkegiatan perangkat daerah tahun 2025.

3.2 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Grafik 3.3.1
Perbandingan Capaian Rata-rata Kegiatan/Subkegiatan dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Selama 5 (lima) tahun terakhir capaian kinerja indikator rata-rata kegiatan/subkegiatan berfluktuatif namun cenderung menunjukkan perlambatan, terutama tahun 2022 hingga 2025. Terkontraksinya capaian atas indikator ini dikarenakan perbedaan metode pengukuran juga secara spesifik, beban target kinerja rata-rata kegiatan/subkegiatan yang agresif seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan fiskal yang *real-time* pada saat pelaksanaan. Hal ini menyebabkan terjadinya *gap* antara target kuantitatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kab. Dharmasraya dengan kapasitas serapan anggaran yang terealisasi. Akibatnya, pencapaian output subkegiatan cenderung tertahan di bawah standar yang diharapkan, meskipun progres pelaksanaan kegiatan secara administratif telah berjalan.

Dilain hal kebijakan rasionalisasi atau *efficiency budgeting* yang dilakukan sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah seringkali memangkas anggaran operasional signifikan. Pemotongan ini

berdampak langsung pada penurunan kapasitas operasional subkegiatan, sehingga target awal yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai (*under-achieved*).

3.3 Perbandingan Capaian Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena ketidaktersediaan data dari Bapperida Provinsi atau Bapperida Kabupaten tetangga pada tenggat waktu yang diberikan, sehingga indikator ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara.

3.4 Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.3.16
Sandingan Capaian Rata-rata Capaian Kegiatan/subkegiatan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Periode Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori Capaian
		Target	Realisasi	%			
3	Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	95	83.78	88.19	95	88.19	Sangat Baik

Sumber: Renstra Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026, data diolah Tahun 2026

Jika dibandingkan capaian ini dengan target pada akhir Renstra, terlihat dengan perubahan metode penghitungan rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan tahun 2025, capaian ini hampir mendekati target dengan capaian kinerja sebesar 88.19%. Guna pencapaian target akhir Renstra maka peningkatan kualitas perencanaan, perumusan kebijakan perencanaan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran serta ketaatan pelaksanaan kegiatan ataupun subkegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi.

3.5 Perbandingan Capaian Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor pendorong keberhasilan indikator Ini adalah:



- a) Dilaksanakannya monitoring evaluasi RKPD.
- b) Ketepatan OPD dalam mengisi *form* pengendalian dan evaluasi;
- c) Rakor berkala setiap triwulan terhadap pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.
- d) Kerjasama yang harmonis dengan OPD, terkait pemberian data dan informasi tentang kegiatan/subkegiatan pembangunan dari masing-masing OPD.

Faktor Penghambat keberhasilan indikator ini:

- a) Keterbatasan kuantitas, kualitas ataupun kompetensi SDM perencana sehingga monev tidak berjalan optimal.
- b) Kurangnya tinjauan lapangan guna evaluasi pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga tingginya tingkat deviasi antara perencanaan dan penganggaran.
- d) Ketaatan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Bapperida serta kepatuhan PD dalam melaksanakan kegiatan/subkegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- e) Perbedaan metode penghitungan data dibandingkan tahun sebelumnya.
- f) Beban target kinerja yang agresif seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan fiskal yang real-time pada saat pelaksanaan kegiatan.
- g) Kebijakan rasionalisasi atau efficiency budgeting

Upaya yang dilakukan guna mengatasi faktor penghambat diatas adalah melalui:

- a) Menganggarkan, mengagendakan dan melaksanakan pemenuhan jam diklat dan bimtek perencanaan secara berkelanjutan bagi SDM



perencana dan SDM yang terkait. Sebagaimana terlihat pada cascading (crosscutting) Bapperida dengan BKPSDM (dana BKPSDM untuk bimtek/diklat) dalam upaya peningkatan kualitas, kompetensi SDM dan

- b) Penguatan komitmen, koordinasi dan konsultasi antara OPD dan Bapperida.

3.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan evaluasi rata-rata capaian subkegiatan, penggunaan SDM menunjukkan tren yang perlu dikaji ulang dari sisi efisiensi. Meskipun intensitas pelaksanaan kegiatan tetap terjaga, kapasitas produktivitas SDM belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output kuantitatif. Terdapat indikasi ketidaksiapan **rasio SDM terhadap beban kerja**, di mana volume pekerjaan yang direncanakan dalam subkegiatan tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi tenaga pelaksana yang tersedia.

Secara spasial dan fungsional, terjadi potensi **inefisiensi alokasi tugas**. Penugasan SDM yang bersifat *multi-tasking* pada berbagai subkegiatan yang berbeda karakteristiknya seringkali mengakibatkan penyebaran fokus kerja yang terlalu luas, sehingga mengurangi kedalaman dan kualitas capaian output. Hal ini diperparah dengan belum sepenuhnya diterapkannya sistem *grade control* atau penyesuaian kelas jabatan dengan kompleksitas teknis kegiatan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat **friktenis biaya oportunistis** pada penggunaan SDM; sumber daya manusia terserap untuk proses administratif dan rutinitas yang tinggi, namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi capaian indikator kinerja yang signifikan. Konsekuensinya, terjadi penggunaan jam kerja yang besar dengan hasil capaian subkegiatan yang cenderung melambat atau tidak tercapai maksimal.

Guna meningkatkan produktifitas dan kemudahan dalam bekerja ataupun berkoordinasi penerapan teknologi informasi dan komunikasi memang mutlak, sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas Bapperida Kab. Dharmasraya menggunakan aplikasi SIPD Perencanaan

b. Efisiensi anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%



$$\text{Tingkat efisiensi : } \frac{(504,630,750 \times 88.19\%) - 502,146,648}{504,630,750} \times 100 = -11.32\%$$

Tabel 3.3.17
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran
Rata-rata capaian Kegiatan/subkegiatan

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Efisiensi	Keterangan
3	Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	%	504,630,750.00	502,146,648.00	88.19%	-11.32	Tidak efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Jika dilihat dari efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja indikator maka dengan pagu anggaran sebesar Rp. 504,630,750,- terealisasi sebesar Rp. 502,146,648,- dengan capaian kinerja indikator sebesar 88.19% dan efisiensi -11.32% maka anggaran ini dapat dikatakan tidak efisien, dikarenakan tingginya penyerapan anggaran tidak diikuti dengan keberhasilan pencapaian kinerja atau kinerja indikator.



Fakta bahwa penyerapan anggaran mendekati atau mencapai nilai penuh sementara kinerja belum terealisasi penuh menunjukkan adanya kebocoran produktivitas. Artinya, setiap 1 rupiah yang dikeluarkan tidak menghasilkan *output* yang setara, sehingga terdapat sisa biaya yang terserap namun tidak terkonversi menjadi capaian kinerja.

Secara substansi, ketidakefisienan ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Alokasi anggaran yang dikeluarkan didasarkan pada asumsi volume kegiatan yang ideal (100%), sementara realisasi di lapangan mengalami kendala eksekusi. Dengan demikian, terjadi ketidakterpaduan antara *budgeting* dan *performance*, di mana mekanisme pengendalian anggaran berdasarkan progres fisik tidak berjalan optimal, menyebabkan biaya tetap berjalan meskipun target kinerja belum terpenuhi sepenuhnya.

3.7 Analisis Program/kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 1 Kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1 (satu) subkegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini berperan dalam mengendalikan, monitoring dan evaluasi capaian sasaran RPJMD, Renstra, Renja PD serta kegiatan/subkegiatan yang direncanakan, dilaksanakan terhadap tahun lalu ataupun tahun berjalan. Pada kegiatan ini kinerja OPD diukur berdasarkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan RKPD melalui Evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara berkala (triwulan) melalui forum koordinasi dan laporan monev antar PD dan

pemerintah daerah untuk menilai pencapaian sasaran selain itu pelaporan juga dikirimkan pada Bappeda Provinsi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. NILAI SAKIP KOMPONEN PERENCANAAN KINERJA

Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Nomor B/395/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan) Tahun 2025.

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan =	Nilai SAKIP komponen perencanaan hasil evaluasi Menpan RB
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan =	22.75

4.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3.18
Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Kategori
			Target	Realisasi	%	
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	Indeks	25	22.85	91.4	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Tahun 2026

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja oleh Menpan menunjukkan angka 22.85, dengan realisasi kinerja dari target 25 serta capaian kinerja 91.40 %, maka butuh 2.15 poin lagi agar tercapai target ditetapkan.

Belum optimalnya pencapaian kinerja tahun 2025 dikarenakan Penjabaran kinerja masih didasarkan dari struktur dokumen

perencanaan dan program/kegiatan yang telah ada, sehingga identifikasi isu strategis, Critical Success Factor (CSF), belum disusunnya identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya crosscutting antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam pencapaian kinerja organisasi serta kinerja yang belum sesuai dengan level jabatannya.

4.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.19

Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2020	19.35	19.35	100.00	↑	Memuaskan
2021	20	19.42	97.10	↓	Sangat Baik
2022	22	22.2	100.91	↑	Memuaskan
2023	23	22.28	96.87	↓	Sangat Baik
2024	24	22.75	94.79	↓	Sangat Baik
2025	25	22.85	91.40	↓	Sangat Baik

Sumber : LAKIP Bapperida Tahun 2021-2024, data diolah Bapperida Tahun 2026

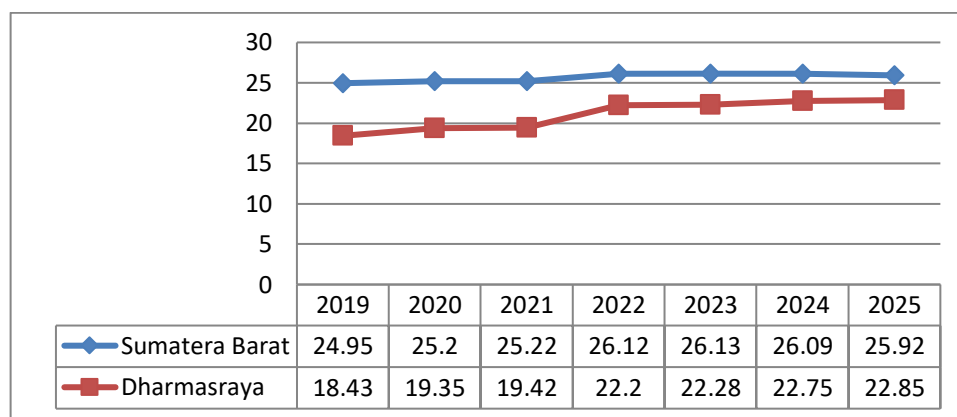
Capaian kinerja atas indikator ini berfluktuatif selama lima tahun terakhir pada capaian 100% tahun 2020, turun 2,90 poin menjadi 97.10% tahun 2021, meningkat 3,81 poin menjadi 100.91% tahun, dan periode tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun menjadi 91.40% tahun 2025. Tren ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap strategi dan efektivitas program, kegiatan agar capaian kinerja tetap optimal dan selaras dengan target yang akan dicapai.

4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena nilai standar nasional dari Kementerian PPN/Bappenas belum dipublish untuk indikator ini. Sebagai alternatif

perbandingannya adalah dengan membandingkan capaian indikator dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 3.3.2
Sandingan Komponen SAKIP Perencanaan Kinerja
Kab. Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat



Sumber : LKJIP Bapperida Tahun 2021-2024, Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat 2026

Seperti terlihat pada grafik diatas, selama tujuh tahun terakhir capaian komponen SAKIP perencanaan kinerja Kab. Dharmasraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dengan deviasi yang cukup tinggi dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perangkat daerahnya menjadi lebih berorientasi hasil. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan perbaikan pada pohon kinerja dengan mempertimbangkan prinsip logis, dan pohon kinerja tersebut telah dijadikan dasar dalam penyusunan perbaikan PK Gubernur dan Kepala PD Tahun 2025, dan yang tak kalah pentingnya kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan secara umum telah menjawab isu strategis yang ada.

4.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.3.20

Perbandingan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Renstra	%	Kategori
			Target	Realisasi	%			
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	%	25	22.85	91.4	26	87.88	Sangat Baik



Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Tahun 2026

Capaian kinerja nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja tahun 2025 belum tercapai jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, dibutuhkan upaya optimal dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan strategi dalam satu tahun ke depan untuk memastikan target akhir Renstra dapat tercapai.

4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan



Jika dianalisis penyebab kegagalan pencapaian Nilai SAKIP komponen perencanaan dikarenakan beberapa eksternal diantaranya :

- Penjabaran kinerja masih didasarkan dari struktur dokumen perencanaan dan program/kegiatan yang telah ada, sehingga identifikasi isu strategis, Critical Success Factor (CSF), serta hubungan sebab-akibat kinerja antar level belum tergambar secara utuh.
- Belum menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya terjadinya crosscutting secara spesifik bentuk kolaborasi antar PD dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi;
- Terdapat penetapan target kinerja yang belum logis dan tidak mencerminkan arah peningkatan sasaran.

- 
- 
- d) Terdapat penetapan target kinerja yang belum logis dan tidak mencerminkan arah peningkatan sasaran.
 - e) Terdapat kinerja pada level PD yang belum sepenuhnya cukup dan relevan untuk mendukung sasaran strategisnya.
 - f) Penjabaran kinerja PD pada level Eselon III belum sepenuhnya mencerminkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial. Contohnya pada PK Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tahun 2025 serta pada sebagian pejabat eselon III di Dinas Pangan dan Perikanan (Dispakan), dimana kinerja yang ditetapkan masih didominasi oleh jumlah dokumen, laporan, dan kegiatan administratif, sehingga belum menggambarkan hasil, dampak, maupun kontribusi strategis terhadap pencapaian sasaran PD.
 - g) Rencana aksi kinerja pada sebagian PD masih berfokus pada pelaksanaan kegiatan rutin dan belum sepenuhnya menggambarkan intervensi yang memadai untuk mendukung pencapaian indikator kinerja.

Kunci keberhasilan dalam peningkatan SAKIP Komponen Perencanaan pada Kab. Dharmasraya adalah:

- a) Komitmen dari pucuk pimpinan.
- b) Evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi dan proses SAKIP serta pengidentifikasian area yang memerlukan perbaikan ataupun perubahan.
- c) Penggunaan data dan bukti yang akurat.
- d) Reformasi perencanaan dan penganggaran (*Planning and budgeting reform*).
- e) Tim inti yang kokoh dan akuntabel.
- f) Pendampingan pihak eksternal yang membantu proses implementasi SAKIP.



Guna peningkatan nilai SAKIP Komponen Perencanaan pada Kab. Dharmasraya telah menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap hasil evaluasi Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya berupa:

Tabel 3.3.21

Rencana Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan Pemda dan PD dengan menyusun pohon kinerja yang logis dan cascading (penjenjangan) kinerja mulai dari level tertinggi hingga terendah dengan memerhatikan critical success factor (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPJMD beriringan dengan Penyusunan Kerangka Logis dan Cascading yang memperhatikan CSF pada masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya dilakukan penyusunan Renstra, RKPD, Renja yang selaras 2. penyusunan turunan kinerja dari jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pencapaian kinerja 3. Evaluasi triwulan terhadap indikator output dan outcome 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 Dokumen (Perda RPJMD, Perbup Renstra, RKPD, Renja) 2. 37 OPD 3. 4 kali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Februari sampai agustus 2025 2. Triwulan 1 3. Triwulan 1,2,3,4 	BAPPERIDA
2	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan OPD yang mengampu Kinerja Outcome atau Outcome Intermediet dalam rangka pemetaan crosscutting 2. identifikasi terhadap indikator kinerja yang berpotensi adanya irisan atau Crosscutting 	2 kegiatan	Triwulan 1	BAPPERIDA DAN BAGIAN ORGANISASI

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	REncana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Penanggung Jawab
3	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada Pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya, memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya	1. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan kinerja mulai RPJMD,RENSTRA, RKPD dan RENJA OPD 2. Perbaikan dokumen perencanaan berdasarkan hasil reviu	3 dokumen reviu	1. Triwulan 3	Inspektorat
4	Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi- aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Pelaksanaan reviu rencana aksi yang telah disusun serta melakukan kegiatan penyelarasan rencana aksi dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam PK	37 OPD	triwulan 1 dan triwulan 4	Bagian Organisasi

Sumber : Bagian Organisasi Kab. Dharmasraya, Tahun 2026

4.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pendukung.

Dari sisi SDM, pencapaian atas indikator ini tidak hanya ditunjang oleh SDM Bapperida namun juga ditopang oleh SDM perencana ataupun yang ditugaskan pada bagian perencanaan perangkat daerah. Secara umum sumber daya manusia yang mendukung perencanaan kinerja pada Bapperida ataupun Perangkat Daerah sudah tersedia, namun masih terbatas dibandingkan dengan beban kerja, demikian juga dengan kompetensi dalam penyusunan indikator kinerja, cascading, penyelarasan antar dokumen perencanaan yang belum merata. Kesenjangan kompetensi SDM perencana ini menyebabkan kualitas perumusan indikator kinerja, cascading belum sepenuhnya optimal.

Disamping dari segi prasarana telah tersedia sistem informasi perencanaan yang mendukung proses penyusunan perencanaan daerah yaitu SIPD Perencanaan, SIPD Penganggaran, SIPD Keuangan begitupun dari sisi kinerja tersedia e-sakip, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan, terutama dalam mendukung integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Dengan kata lain optimalisasi SIPD dan e-sakip guna meningkatkan efektifitas proses perencanaan.

b. Sumber daya anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100\%$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%

Tabel 3.3.22
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisien	Keterangan
4	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	Indeks	693,907,900.00	691,955,214.00	91.40	-8.31	Tidak Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar -8.31% dengan porsi anggaran sebesar Rp. 693,907,900,- pada realisasi anggaran sebesar Rp. 691,955,214.00,-. Nilai efisiensi yang negatif tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja belum sepenuhnya efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya kegiatan yang dilaksanakan lebih berorientasi pada pemenuhan proses administrasi dibandingkan pada pencapaian hasil (outcome), keterkaitan antara kegiatan dengan indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang bersifat koordinatif dan fasilitatif juga memerlukan dukungan anggaran yang relatif besar, namun kontribusinya terhadap peningkatan capaian indikator kinerja belum sepenuhnya terukur secara langsung.

4.7 Analisis Program/kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :





1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan melalui pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di 11 (sebelas) kecamatan tahun 2026 dan pelaksanaan musrenbang RKPD dikabupaten tahun 2026 sebagai sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat agar menghasilkan perencanaan kinerja yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah merupakan elemen kunci guna memastikan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kab. Dharmasraya berkualitas. Pada kegiatan ini Bapperida berperan sebagai (1) koordinator dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja sebelum kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan sehingga pada periode RPJMPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap I RPJPD 2025-2045, Perencanaan Kinerja Kabupaten Dharmasraya memuat tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang benar-benar menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi daerah, yang pada akhirnya visi dan misi jangka menengah daerah dapat terwujud dan berdampak pada masyarakat Kabupaten Dharmasraya. (2) penguatan akuntabilitas melalui penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang SMART. (3) sinkronisasi tujuan dan sasaran pembangunan antar dokumen perencanaan. (4) pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan



indikator kinerja yang telah direncanakan. (5) penetapan target kinerja yang relevan. (5) penetapan dan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama. (6) keterkaitan program/kegiatan dengan renstra dan RPJMD.



c. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada kegiatan analisis data Bapperida bertindak sebagai koordinator Satu Data Indonesia (SDI). Pada kegiatan ini dilakukan : (1) analisis data untuk menyusun sasaran kinerja yang membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, menentukan sasaran kinerja, menetapkan target yang realistis. (2) penentuan indikator kinerja (IKU) yang terukur, relevan dengan tujuan strategis yang telah disusun serta mencerminkan output dan outcome dari program/kegiatan Perangkat Daerah.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) merupakan koordinasi pada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bapperida bidang PPM berperan dalam (1) koordinator dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja (2) penguatan akuntabilitas melalui penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang SMART. (3) sinkronisasi tujuan dan sasaran pembangunan antar dokumen perencanaan. (4) pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. (5) penetapan target kinerja yang relevan. (5) penetapan dan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama. (6) keterkaitan program/kegiatan dengan renstra dan RPJMD. Pada PD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) merupakan koordinasi pada PD bidang



perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Bapperida bidang perekonomian dan SDA berperan (1) koordinator dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja (2) penguatan akuntabilitas melalui penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang SMART. (3) sinkronisasi tujuan dan sasaran pembangunan antar dokumen perencanaan. (4) pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. (5) penetapan target kinerja yang relevan. (5) penetapan dan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama. (6) keterkaitan program/kegiatan dengan renstra dan RPJMD. Pada PD lingkup bidang perekonomian dan SDA.

- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Merupakan koordinasi pada PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bapperida Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berperan dalam berperan (1) koordinator dalam melakukan penyusunan penjenjangan kinerja (2) penguatan akuntabilitas melalui penetapan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang SMART. (3) sinkronisasi tujuan dan sasaran pembangunan antar dokumen perencanaan. (4) pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sehingga sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan. (5) penetapan target kinerja yang relevan. (5) penetapan dan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama. (6) keterkaitan program/kegiatan dengan renstra dan RPJMD. Pada PD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan.

5. NILAI SAKIP KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA

Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Nomor B/395/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) Kab. Dharmasraya yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Menpan) Tahun 2025.

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja =	Hasil Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja Kab. Dharmasraya oleh Menpan RB
Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja ==	19.54

5.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3.23
Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Kategori
			Target	Realisasi	%	
5	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Indeks	22	19.54	88.23	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Tahun 2026

Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja Kabupaten Dharmasraya menunjukkan angka 19.54 dengan capaian sebesar 88.23% terhadap target 22 pada kategori sangat baik.

Capaian ini bermakna Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan perangkat daerahnya telah melakukan pengukuran kinerja dan menyampaikan rencana aksi secara periodik atau triwulan serta telah melakukan penyempurnaan terhadap IKU Pemda dan PD dengan formulasi perhitungan dan telah dipublikasikan pada website resmi PPID Kabupaten Dharmasraya.

5.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.23
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2020	16.48	16.48	100.00	↑	Memuaskan
2021	18	16.48	91.56	↓	Sangat Baik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2022	19	18.19	95.74	↑	Sangat Baik
2023	20	18.64	93.20	↓	Sangat Baik
2024	21	19.54	93.05	↓	Sangat Baik
2025	22	19.54	88.82	↓	Sangat Baik

Sumber : LKJiP Bapperida Tahun 2022-2024, data diolah Bapperida Tahun 2026

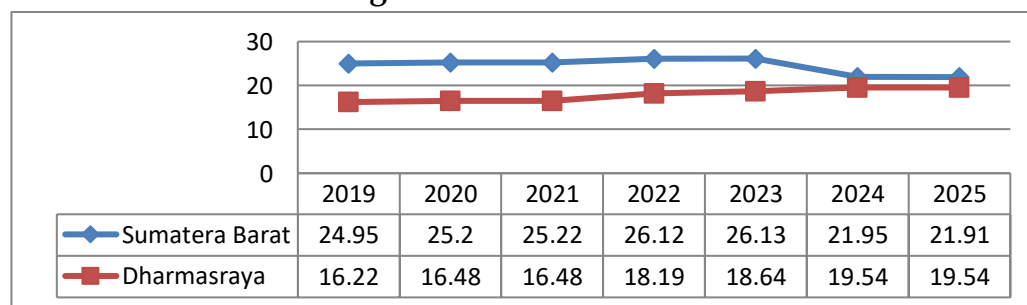
Capaian kinerja atas indikator ini berfluktuatif dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu dari capaian 100% tahun 2020, menurun ke 91.56% tahun 2021 dan meningkat ke 95.74% tahun 2022. Selanjutnya menunjukkan tren negatif dari tahun 2023 pada 93.20% menuju 93.05% tahun 2024 dan akhirnya ke 88.82% tahun 2025.

Capaian kinerja yang kurang signifikan berdasarkan tabel 3.3. 23 ditunjukkan dengan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja Kab. Dharmasraya *e-sakip*, yang ditandai dengan belum konsistennya pengisian dan pemutakhiran data pengukuran kinerja oleh PD.

5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator ini. Sebagai alternatif perbandingannya adalah dengan membandingkan capaian indikator dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 3.3.3
Sandingan Capaian Komponen SAKIP Pengukuran Kinerja dengan Provinsi Sumatera Barat



Sumber : LKJiP Bapperida Tahun 2021-2024, Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Rentang 7 (tujuh) tahun terakhir capaian kinerja Kab. Dharmasraya masih berada di bawah provinsi namun fokus hasil evaluasi Menpan terhadap komponen SAKIP pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi juga pada fokus pedoman pengumpulan dan pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja yang belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan ataupun perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak jauh berbeda dengan Kab. Dharmasraya.



Deviasi nilai Komponen Pengukuran Kinerja Kab. Dharmasraya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki aplikasi Dashboard Pembangunan sebagai bentuk transparansi terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang memberi informasi pemberian rapor untuk lima PD tertinggi dan terendah dalam realisasi keuangan dan realisasi kinerja selain itu pengukuran kinerja PD telah dilakukan secara triwulanan menggunakan aplikasi e-SAKIP dengan PD melakukan penginputan realisasi rencana aksi dan realisasi anggaran pada aplikasi tersebut. Selain itu, pengukuran kinerja individu dilakukan menggunakan aplikasi madani yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

5.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.3.25
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
			Target	Realisasi	%			
5	Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	indeks	22	19.54	88.82	23	84.96	Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026



Capaian kinerja nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja tahun 2025 belum mencapai target jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir Renstra, masih dibutuhkan 15,04 poin lagi dari capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 84,96% saat ini agar capaian target akhir Renstra tercapai.

5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Jika dianalisis penyebab kegagalan atau penurunan capaian dikarenakan :

- a) Monitoring terhadap rencana aksi pada sebagian PD belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.
- b) Aplikasi E-Sakip Kabupaten Dharmasraya sudah dimanfaatkan untuk pemantauan kinerja secara berkala, akan tetapi aplikasi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh sebagian PD. Hal ini terlihat dari pengisian capaian kinerja dan realisasi rencana aksi pada tahun 2025 yang belum lengkap;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada sebagian PO masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja outcome yang diperjanjikan, sehingga capaian kerjanya belum diketahui.

Kunci keberhasilan dalam peningkatan komponen SAKIP pengukuran kinerja pada Kab. Dharmasraya adalah:

- a) Komitmen dari pucuk pimpinan;
- b) Penetapan indikator kinerja yang relevan dan terukur;
- c) Pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu;
- d) Penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan;
- e) Pengembangan kapasitas pegawai dalam penggunaan sistem pengukuran kinerja;
- f) Birokrasi yang kompeten dan kapabel;

g) Pendampingan pihak eksternal yang membantu proses implementasi SAKIP.

Alternatif solusi yang telah dilakukan dalam peningkatan SAKIP pada Kab. Dharmasraya :

- a) Pelaksanaan monitoring evaluasi rencana aksi perangkat daerah;
- b) Koordinasi aplikasi E-SAKIP ke Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat;
- c) Bimtek Pengisian aplikasi e-SAKIP Dharmasraya;
- d) Monev Penigisian aplikasi e-SAKIP;
- e) Penyusunan anggaran dan reuiu Anggaran fokus pada kinerja yang dilakukan saat penyusunan anggaran bersama tim TAPD.

5.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Guna pencapaian atas indikator ini didukung oleh kinerja SDM pada tiga bidang yaitu bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan serta bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disamping itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi yakni aplikasi *e-sakip* memang mutlak sebagai alat bantu dalam untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap PD.

d. Efisiensi anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

Tingkat Efisiensi = $(PA * CK\%) - RA \times 100\%$

PA

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%

Tabel 3.3.26
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Efisiensi	Keterangan
5	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Indeks	693,907,900.00	691,955,214.00	88.62%	-11.10	Tidak Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja tahun 2025 didukung pagu anggaran sebesar Rp. 693,907,900.00,- terealisasi sebesar Rp. 691,955,214.00,- dengan capaian kinerja indikator sebesar 88.62%

Tingkat efisiensi anggaran nilai sakip komponen pengukuran kinerja -11.10% dalam mencapai kinerja 88.62% hal ini mengindikasikan tingkat penyerapan anggaran pada relatif lebih tinggi dari pada capaian kinerja yang dihasilkan.

Tidak efisiennya anggaran dalam pencapaian sasaran ini dikarenakan keterkaitan antara kegiatan dengan indikator kinerja yang belum sepenuhnya optimal serta belum dimanfaatkannya secara efektif aplikasi E-Sakip Kab. Dharmasraya untuk pemantauan kinerja secara berkala serta monitoring dan evaluasi belum mencakup capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan.

5.7 Analisis Program/kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja didukung oleh Program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



Kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan melalui pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di 11 (sebelas) kecamatan tahun 2026 dan pelaksanaan musrenbang RKPD dikabupaten tahun 2026 sebagai sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat

b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah merupakan elemen kunci guna memastikan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja Kab. Dharmasraya terukur. Pada kegiatan ini Bapperida berperan dalam (1) penetapan indikator kinerja yang terukur, melalui penyusunan indikator kinerja yang SMART dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra PD yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang terdefinisi dan objektif. (2) sinkronisasi indikator kinerja yang dipilih dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah ataupun Perangkat Daerah dan program prioritas pembangunan. (3) penyelarasan target kinerja dengan kapasitas pelaksanaan melalui penetapan target indikator kinerja yang realistis sesuai dengan kapasitas sumber daya Pemerintah Daerah.

c. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pada kegiatan analisis data Bapperida bertindak sebagai koordinator Satu Data Indonesia (SDI). Pada kegiatan ini dilakukan : (1) analisis data terhadap target yang telah ditetapkan dalam perencanaan (2) evaluasi kemajuan kinerja berupa evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan target kinerja serta penyebab apabila ada kesenjangan terhadap data yang ada.



2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) merupakan koordinasi pada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Bapperida bidang PPM berperan (1) penetapan indikator kinerja yang terukur, melalui penyusunan indikator kinerja yang *SMART* dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra PD yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang terdefinisi dan objektif. (2) sinkronisasi indikator kinerja yang dipilih dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah ataupun Perangkat Daerah dan program prioritas pembangunan. (3) penyelarasan target kinerja dengan kapasitas pelaksanaan melalui penetapan target indikator kinerja yang realistis sesuai dengan kapasitas sumber daya Pemerintah Daerah Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) merupakan koordinasi pada PD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Bapperida bidang Bidang Perekonomian dan SDA berperan (1) penetapan indikator kinerja yang terukur melalui penyusunan indikator kinerja *SMART* dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra PD yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang terdefinisi dan objektif. (2) sinkronisasi indikator kinerja yang dipilih dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah ataupun Perangkat Daerah dan program prioritas pembangunan. (3) penyelarasan target kinerja dengan kapasitas pelaksanaan sumber daya Pemerintah Daerah Perangkat Daerah bidang perekonomian dan SDA melalui penetapan target indikator kinerja yang realistis.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Merupakan koordinasi pada PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Bapperida bidang infrastruktur dan kewilayahan berperan (1) penetapan indikator kinerja yang terukur, melalui penyusunan indikator kinerja yang *SMART* dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra PD yang memungkinkan pengukuran kinerja dilakukan dengan standar yang terdefinisi dan objektif. (2) sinkronisasi indikator kinerja yang dipilih dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah ataupun Perangkat Daerah dan program prioritas pembangunan. (3) penyelarasan target kinerja dengan kapasitas pelaksanaan melalui penetapan target indikator kinerja yang realistis sesuai dengan kapasitas sumber daya Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah pada lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan.

SASARAN STRATEGIS 2

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA FUNGSI LITBANG DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. INDEKS INOVASI DAERAH

Sasaran Strategis ke-2 (dua) “**Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah**” diukur dari indikator yaitu “**Indeks Inovasi Daerah (IID)/ *Innovative Government Award (IGA)***”. IGA merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Sesuai dengan Pasal 6 Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon

penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa IGA, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sebagai berikut:

1. Daerah provinsi terinovatif
2. Daerah kabupaten terinovatif;
3. Daerah kota terinovatif;
4. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori daerah tertinggal;
5. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori kawasan perbatasan; dan
6. Daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 tanggal 9 Desember 2025 perihal Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 adalah:

Tabel 3.3.27
Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01-100
Inovatif	35,00-60,00
Kurang Inovatif	0,01-34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

<i>Indeks Inovasi Daerah =</i>	<i>Berdasarkan SK Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025</i>
<i>Indeks Inovasi Daerah =</i>	<i>66.80(Sangat Inovatif)</i>

1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3.28
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Kategori
			Target	Realisasi	%	
6	Indeks Inovasi Daerah/ <i>Innovative Government Award</i>	indeks/ bobot	75 (Sangat Inovatif)	66.80 (Sangat Inovatif)	89.07	Sangat Baik

Sumber : SK Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.27 dapat dilihat bahwa untuk mencapai target indikator sasaran strategis kedua, diukur dari satu indikator yaitu Indeks Inovasi Daerah/*Innovative Government Award* dengan capaian kinerja 91.73%, capaian atas sasaran dan indikator ini pada kategori sangat baik. Adapun inovasi yang dikirimkan sebagai bahan penilaian pada tahun 2025 merupakan rekapitulasi dari inovasi pada dua tahun terakhir yaitu inovasi tahun 2022 dan tahun 2023. Pencapaian kinerja atas indikator ini belum mencapai poin indeks yang telah ditargetkan namun demikian capaian ini berada pada kelas yang sama karena Kab. Dharmasraya berada pada predikat "Sangat Inovatif" atau Kabupaten Sangat Inovatif serta berada pada posisi 61 dari 415 kabupaten se-Indonesia.

Berikut 63 inovasi Kab. Dharmasraya yang dikirimkan ke BKSDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) guna penilaian IGA Tahun 2025:

Tabel 3.3.29

Daftar Inovasi Perangkat Daerah Penilaian Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	1 TAKTIKS MAS KABAN (Pemetaan Kemiskinan Berdasarkan Nama, Alamat, dan Kebutuhan)	Implementasi
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	2 LARI PATAS TUNTAS (Layanan Perizinan Tanpa Batas Untuk Disabilitas)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	3 DUTA PERIZINAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	4 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Tata Ruang (SIPPETARUNG)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	5 GENIUS REBORN (Generasi Urus Izin Sendiri Reborn)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	6 SIKEMAD (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat Online DPMPSTSP)	Implementasi
3	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	7 STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI KOLABORASI DAN HARMONISASI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN (SARANA HARAPAN) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Implementasi
4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	8 Ingat Waktu Tera Ulang (i-Water)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	9 Klinik Promas Pro UMKM	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	10 GERBANG BUDAYA OVO PRIMA	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	11 STIGMA METER	Implementasi
5	Dinas Sosial P3APPKB	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	12 BERLIAN CERIA	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	13 Sistem Pembangunan Pelayanan dan Pengaduan Terpadu Satu Atap di Kabupaten Dharmasraya (si-PULAU PANDHA)	Implementasi
6	Dinas Pangan dan Perikanan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	14 Fish Regency (Rumah Ikan)	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	15 Sikumis Park (Kampung Lele)	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	16 Bu Ramah Tangkap Ikan	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	17 PERMAK BERDASI (Pemberian Makanan Berbahan Dasar Ikan)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Digital	18 SISTEM PELAYANAN PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN MELALUI BIDAN SECARA DARING (SIPETA BILING)	Implementasi
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi tata kelola pemerintah	Digital	19 E-LEARNING	Implementasi
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	20 LINK Terpadu (Layanan Informasi Kearsipan Terpadu)	Implementasi
10	Dinas Lingkungan Hidup	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	21 GAGAH PISAN (Gerakan Keluarga dan Sekolah Pilah Sampah)	Implementasi
11	Dinas Pertanian	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	23 Sistem Tanam Benih Langsung Dengan Jajar Legowo (SITABELO)	Implementasi
		Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	24 PERTANIAN MASUK SEKOLAH (PETI MAS)	Implementasi
12	Dinas Pendidikan	Inovasi pelayanan publik	Digital	25 SATUKA (Sarana Pembentukan Karakter)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	26 DP BANG BPD (Dashboard Pemantau Perkembangan Pendidikan Berbasis Platform Digital)	Implementasi
13	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	27 BIDADARI KELUARGA VERSI 2 (BIDAN DATANG DENGAN ASUHAN MANDIRI PADA KELUARGA VERSI 2)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	28 Surat Untuk Mengabarkan Rencana Imunisasi Anak (SUMBAR RANCAK)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	29 POKOK SAWIT (Kelompok dan Tokoh Keluarga Peduli Sasaran Wilayah Hipertensi)	Implementasi
14	UPT RSUD Sungai Dareh	Inovasi pelayanan publik	Digital	30 ANTROLI KASIR KALI DAREH	Implementasi
15	UPT RSUD Sungai Rumbai	Inovasi pelayanan publik	Digital	31 KACIO (eduKasi tuberCulosIs Online)	Implementasi
16	UPT Puskesmas Sungai Rumbai	Inovasi pelayanan publik	Digital	32 Kartu Digital Sungai Rumbai Sehat untuk Eradikasi Stunting (KARDI SARAS)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	33 Sungai Rumbai Sehat Bersama KARTU PATEN (Kenali, Atasi, Rehabilitasi, dan Terapkan Upaya Pantau Hipertensi)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	34 Optimalisasi Pelayanan Konseling Obat pada Pasien Diabetes dan Hipertensi (OPAK PADEH)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	35 BERAS MERAH (Bersihkan Sarang Nyamuk Sekitar Rumah)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	36 SERUNI IKAN KAKAP (Sertifikat Inovasi Dasar Lengkap)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	37 LADO KUTU (Pelayanan Dokter ke Pustu)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	38 KECAPI (Konseling Edukasi Calon Pengantin)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	39 BIDADARI NAUN PISAN (Bidan Datang Dengan Asuhan Mandiri dan Menabung Untuk Persalinan Pada Keluarga)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	40 INTIP MAS (Informasi Terintegrasi dan Pengaduan Puskesmas)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	41 Peningkatan Pengetahuan Cara Pengambilan sampel Sputum pada Pasien Suspek Tuberkulosis (PEPES TERI)	Implementasi
17	UPT Puskesmas Sungai Dareh	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	42 KAMI SEHATI (Gerakan ibu hamil sehat cegah stunting)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	43 BA PASAN (BERSAMA PANTAU PASIEN JIWA SETELAH RAWATAN)	Implementasi
18	UPT Puskesmas Sialang	Inovasi pelayanan publik	Digital	44 Cintai dengan Rasa Empati Layani Orang dengan HIV (CINDERELA ODHIV)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	45 Berdayakan Kader Sehatkan Nagari Untuk Penurunan Stunting (BERAKSI PENTING)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	46 Awasi Kesehatan dan Tumbuh Kembang Remaja Putri (SIKUMBANG JATI)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Digital	47 Mari ke Puskesmas Cek Dahak (MARIMAS CEKDAH)	Implementasi
19	UPT Puskesmas Sitiung 1	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	48 LAGUKU KIAN PADU (LAYANAN USG BEDAH BUKU KIA DAN ANC TERPADU)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	49 MARATO PASANG ANTENA (Manajemen Pelaporan Terpadu Obat Puskesmas dan jaringan Melalui Rangkaian Microsoft Excel Sederhana)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	50 KEMENKES SIGIMIL (KARTU PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT IBU HAMIL)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	51 SUP CEKER PEDAS (SKRINING DAN CEK GULA DARAH PADA KELUARGA PENYANDANG DIABETES)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	52 PITIH CANGOK (THERAPY BERHENTI MEROKOK/ PITIH ABIH CACAK ONGOK)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	53 MAHARAJA BAHAGIA (MENGONTROL HIPERTENSI SECARA TERATUR, TERJAGA AGAR HIDUP SEHAT DAN BAHAGIA)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	54 TAUBAT SIRANI (PEMANTAUAN TERAPI OBAT PADA PASIEN RAWAT INAP)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	55 DESERTASI (Barcode dan sertifikasi Asi Eksklusif)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	56 SADAR DOSIS (SHARING ILMU DARI DOKTER SPESIALIS)	Implementasi
20	UPT Puskesmas Gunung Medan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	57 DEDEK MENARI	Implementasi
21	UPT Puskesmas Tiumang	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	58 PADUKA BERISTRI (Pelayanan Terpadu Kasus Ibu Hamil Beresiko Tinggi)	Implementasi
22	UPT Puskesmas Timpeh	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	60 GALI CINTAKU (KELUARGA PEDULI CATATAN IMUNISASI DASAR DAN LANJUTAN UNTUK KUNJUNGAN ULANG)	Implementasi
		Inovasi pelayanan publik	Non Digital	61 BERITA SI TB (BERSAMA NAGARI KITA ELIMINASI TB)	Implementasi

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Bentuk Produk Inovasi	Jenis Produk Inovasi	Nama Produk Inovasi	Status Produk Inovasi
23	UPT SDN 01 Pulau Punjung	Inovasi pelayanan publik	Digital	62 Samity Sdlsa (Satu minggu sekali murid belajar IT secara langsung dari kelas 1 sampai kelas VI menggunakan Chromebook)	Implementasi
24	UPT SDN 03 Tiumang	Inovasi pelayanan publik	Digital	63 Strategi Peningkatan Kompetensi Guru Melalui KomBel Mem-Peng (Komunitas Belajar Membangun Pengetahuan) UPT SD Negeri 03 Tiumang Kab. Dharmasraya	Implementasi

Sumber : Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, 63 Inovasi penilaian tahun 2025 berasal dari 13 Perangkat Daerah dan 11 Unit Pelayanan Teknis (UPT). Perangkat Daerah dengan jumlah inovasi terbanyak yaitu UPT Puskesmas Sungai Rumbai dengan 10 inovasi, UPT Sitiung 1 sebanyak 9 inovasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 6 inovasi, diikuti perangkat daerah dan UPT lainnya.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya



Tabel 3.3.30
Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2020	3	3	100.00	↑	Memuaskan
2021	48.07	48.07	100.00	↑	Memuaskan
2022	65	57.84	88.98	↓	Sangat Baik
2023	70	55.61	79.44	↓	Baik
2024	72.5	63.12	87.06	↑	Sangat Baik
2025	75	66.8	89.07	↑	Sangat Baik

Sumber : LAKIP Bapperida Tahun 2022-Tahun 2024, Data diolah Bapperida Tahun 2026

Capaian kinerja atas indikator ini menunjukkan angka yang tetap dari tahun 2020 hingga 2021, menurun tajam pada angka 88.98% tahun 2022 dan 79.44% tahun 2023, selanjutnya menunjukkan tren positif pada tahun 2024 di 87.06% dan 91.73% tahun 2025.

Dari tabel diatas terlihat walaupun tahun 2020 capaian kinerja Indeks inovasi Kab. Dharmasraya dengan capaian kinerja 100% atau memuaskan namun hal ini berbanding terbalik dengan predikat Kab. Dharmasraya yang berada pada kondisi "Kabupaten Tidak Inovatif". Perlahan indeks inovasi Kabupaten Dharmasraya mulai bangkit secara bertahap dan menanjak naik kelas ke peringkat Sangat Inovatif atau "Kabupaten Sangat Inovatif" tahun 2024 dan tahun 2025 ini.



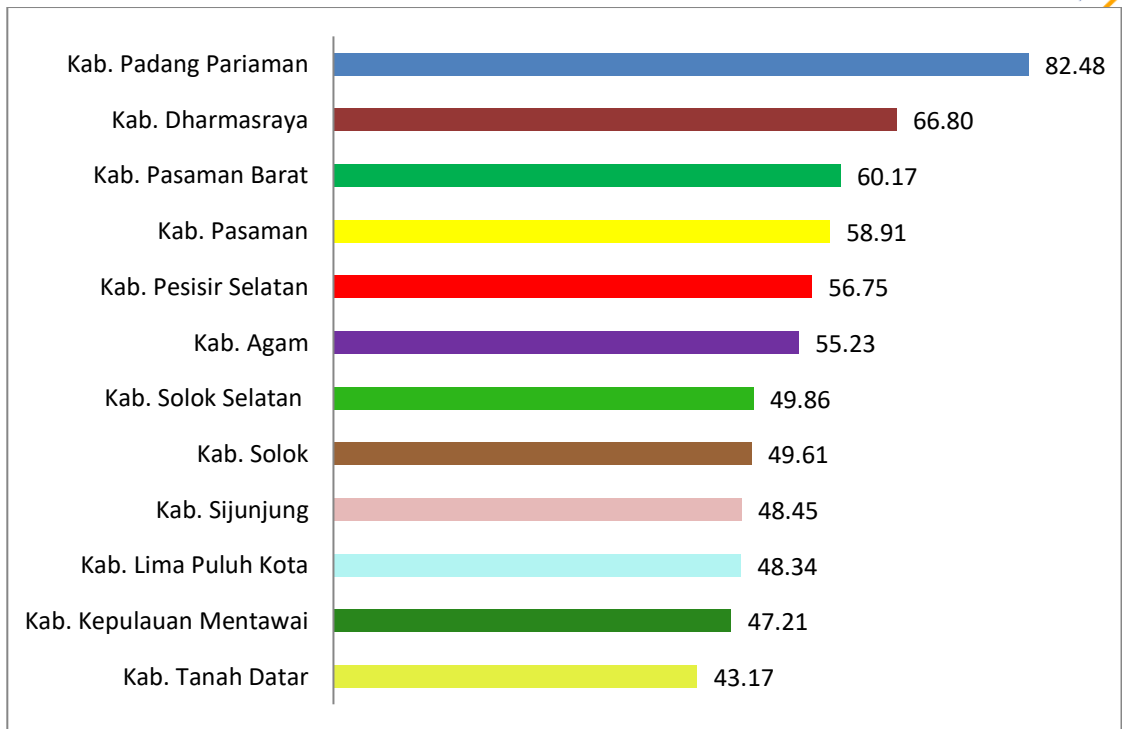
Peningkatan prestasi ini selain dikarenakan peningkatan jumlah inovasi yang dikirimkan, peningkatan nilai kematangan inovasi dan replikasi, kontribusi inovasi terhadap peningkatan pelayanan publik, dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat, keragaman inovasi yang mencakup pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi yang sesuai dengan kewenangan, juga konsistensi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator ini. Sebagai alternatif perbandingannya adalah dengan membandingkan capaian indikator dengan Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat karena jika diperbandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kota se-Provinsi Sumatera Barat kategori pengelompokannya penilaian berdasarkan SK Kepmendagri berada pada kategori yang berbeda. Penilaian Indeks Inovasi Daerah tingkat Kabupaten dimasukkan pada pengelompokan penilaian Indeks Inovasi Daerah tingkat Kabupaten se-Indonesia sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 3.3.4

Sandingan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat



Sumber : SK Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 400.10.11-6097 Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2025 berada pada peringkat ke-2 tingkat Kabupaten se-Sumatera Barat dibawah capaian Kab. Padang Pariaman, capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua Kabupaten yang pemekarannya serentak dengan Kab. Dharmasraya yaitu Kabupaten Pasaman Barat pada capaian 60,17 dan Kabupaten Sijunjung dengan capaian 48,45.

Tingkat ketimpangan Indeks Inovasi Daerah Kab. Dharmasraya yang sangat signifikan dengan Padang Pariaman pada angka 15,61 poin tidak terlepas dari komitmen antara pimpinan, yaitu Bupati Padang Pariaman yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara pimpinan Perangkat Daerah dengan Bupati untuk menghasilkan minimal 2 inovasi setiap tahunnya. Di samping itu perbaikan dari pada nilai Satuan Pemerintah Daerah melalui capaian kinerja indikator kinerja makro menunjukkan bahwa inovasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten

Padang Pariaman memberikan dampak yang sangat baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.3.31

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
			Target	Realisasi	%		
7	Indeks Inovasi Daerah/ <i>Innovative Government Award</i>	indeks/ bobot	75	66.80	89.07	83.50	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, Data diolah Bapperida Tahun 2026

Capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 masih cukup signifikan rentang capaiannya jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir Renstra. Oleh karena itu perlu upaya yang strategis terarah dan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem inovasi dilingkungan perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Hal yang menjadi dilema ataupun tantangan pada sasaran ini disamping keberadaannya yang dibutuhkan adalah:

- 1) Belum adanya kebijakan yang mendorong OPD beserta staff berpartisipasi dalam melahirkan inovasi dari OPD-nya masing-masing baik dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pemerintahan;
- 2) Terbatasnya jumlah inovasi yang memenuhi syarat persyaratan verifikasi sesuai ketentuan;
- 3) Masih kurangnya minat dan partisipasi perangkat daerah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen indikator inovasi dan mencetuskan ide-ide inovasi tiap OPD.



Faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah upaya sebagai berikut :

1. Pendampingan berkesinambungan pada Perangkat Daerah guna penerbitan regulasi terkait Inovasi Daerah.
2. Bimbingan Teknis Pemantapan Inovasi Daerah untuk menumbuhkan ide-ide inovasi Perangkat Daerah.
3. Proaktif dalam memberikan arahan ataupun bimbingan terhadap Pengelola Inovasi Perangkat Daerah untuk memperoleh nilai kematangan inovasi yang tinggi.
4. Coaching inovasi dan klinik keliling dalam peningkatan pemahaman peserta inovasi.
5. Pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala.

Berpijak pada hal diatas, maka langkah yang mesti ditempuh agar Indeks Inovasi Kab. Dharmasraya mencapai target yang ditetapkan antara lain:

1. Membuat MOU dan komitmen dengan Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan inovasi daerah.
2. Setiap kegiatan dari OPD disarankan mencetuskan inovasinya;
3. Penetapan minimal inovasi bagi tiap OPD.
4. Komitmen, berupa pemberian *reward* bagi OPD yang memiliki Inovasi terbanyak dan pemberian *punishment* bagi OPD yang tidak mencetuskan inovasi.

1.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

- a. Analisis sumber daya manusia serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Dalam mencapai target kinerja sasaran Indeks Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Dharmasraya khususnya bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida) bersinergi mengumpulkan inovasi melalui media *whats app* (link)

walaupun ada juga Perangkat Daerah yang mengumpulkan langsung ke Bapperida. Disamping itu, sebagai media publikasi dan meningkatkan poin pada penilaian Indeks Inovasi Daerah, Perangkat Daerah difasilitasi agar sedini mungkin mempublikasi inovasi baik melalui *youtube*, website Instagram dan Facebook Perangkat Daerah masing-masing agar informasi bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

b. Efisiensi anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100\%$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%

Tabel 3.3.32

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Kinerja	Efisiensi	Keterangan
6	Indeks Inovasi Daerah/ Innovative Government Award	indeks/ bobot	205,000,000	192,140,271	89.07%	-4.66	Tidak Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Fungsi Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Dan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah/ *Innovative Government Award* pada target 75 tercapai sebesar 68,80 tahun 2025 dengan tingkat capaian kinerja 91.73%, telah disediakan anggaran yang sebesar Rp. 12,584,900.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12,428,400.00 atau sebesar 98.76%.

Dengan tingkat efisiensi -9.69% ini bermakna, anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah/*Innovative Government Award* sebesar 91.73% tidak efektif dimana terjadi defisit atau pemborosan dibandingkan dengan target efisiensi yang diharapkan.

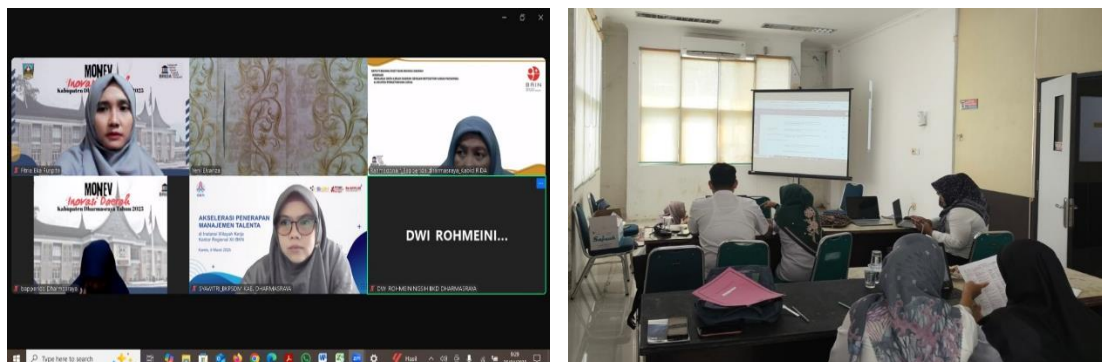
Tidak efisiennya anggaran dalam pencapaian sasaran ini dikarenakan rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam melahirkan ide inovasi beserta pemenuhan dokumen kelengkapan inovasi. Dilain hal bimtek inovasi yang dilaksanakan sebagai wahana peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi Perangkat Daerah tidak memenuhi *outcome* kegiatan yang diharapkan, karena sejatinya saat detik-detik pemenuhan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan, inovator/Perangkat Daerah masih rancu dalam memahami bahkan tidak memahami standar unsur penilaian Indeks Inovasi Daerah yang ada.

1.7 Analisis Program/kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah sebanyak 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta subkegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Gambar 3.3.1

Monev dan Bimtek Inovasi Daerah



Sumber : Dokumentasi Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta subkegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Bapperida khususnya bidang riset dan inovasi daerah melakukan rapat koordinasi, bimtek penginputan inovasi, coaching klinik inovasi, pembuatan kebijakan bidang inovasi serta monitoring dan evaluasi inovasi kepada semua Perangkat Daerah ataupun Unit Pelayanan Teknis (UPTD) se-Kabupaten Dharmasraya.

SASARAN STRATEGIS 3

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. NILAI AKIP BAPPERIDA

Sasaran Strategis ke-3 (tiga) “**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” diukur dari 1 (satu) indikator yaitu “Nilai AKIP Bapperida”. Untuk menghitung nilai AKIP Bapperida, berdasarkan kepada evaluasi AKIP dan Reviu AKIP Perangkat Daerah khususnya Bapperida oleh Inspektorat. Hasil evaluasi atas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bapperida Tahun 2024, seperti disampaikan

Nilai AKIP Bapperida =	Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Inspektorat No LAP-020/EV/Insp-2025 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
Nilai AKIP Bapperida =	70.39 (BB)

1.1 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.3.33
Capaian Hasil penilaian AKIP Bapperida Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
7	Hasil penilaian AKIP Bapperida	%	A (81.48)	BB (70.39)	86.39	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, Data diolah Bapperida Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Bapperida memperoleh nilai 70.39 (BB) yang menunjukkan bahwa AKIP Bapperida Hasil penilaian AKIP Bapperida dari target predikat "A" pada angka 81,48 terealisasi predikat "BB" (70,39) dengan capaian 86,39% atau kategori sangat baik.

Hasil Evaluasi Penilaian AKIP Bapperida mencakup empat komponen sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.34
Hasil Evaluasi AKIP Bapperida Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	2025	Kategori
1	Perencanaan Kinerja	30	27.87	A
2	Pengukuran Kinerja	30	17.36	C
3	Pelaporan Kinerja	25	14.95	A
4	Evaluasi Internal	12	10.21	C
		100	70.39	BB

Sumber : LHE Inspektorat Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Jika ditinjau dari evaluasi terhadap empat komponen penilaian AKIP Bapperida tahun 2025, capaian indikator kinerja ini perlu disertai strategi perbaikan. Hal ini mengingat Bapperida masih memiliki catatan pada komponen pengukuran kinerja serta evaluasi internal yang masih berada pada kategori C.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3.35
Perbandingan Capaian Hasil Penilaian AKIP Bapperida Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Posisi	Predikat
2020	73.82	73.82	100.00	↑	Memuaskan
2021	79.4	79.40	100.00	↑	Memuaskan
2022	79.92	72.52	90.74	↓	Sangat Baik
2023	80.44	83.71	104.07	↑	Memuaskan
2024	80.96	86.96	107.41	↑	Memuaskan
2025	81.48	70.39	86.39	↓	Sangat Baik

Sumber : LKjIP Bapperida Tahun 2022-2024, Data diolah Bapperida Tahun 2026

Capaian kinerja atas indikator ini menunjukkan angka yang berfluktuatif, dari tahun 2020 hingga 2021 yaitu dengan capaian 100% memasuki tahun 2022 terjadi penurunan kinerja sebesar 9,26 poin menjadi 90,74% tahun 2022 meningkat, kemudian dua tahun terakhir menunjukkan tren positif hingga mencapai 107,41% tahun 2024 dan menurun lagi menjadi 86,39% Tahun 2025.

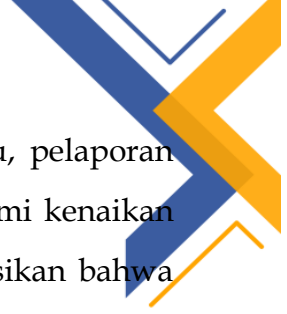

Berfluktuatif capaian kinerja indikator ini tak terlepas dari capaian terhadap 4 (empat) komponen penilaian AKIP Bapperida sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.36
Perbandingan Komponen Penilaian AKIP Bapperida Dengan Tahun Sebelumnya

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan kinerja	tidak data ada penilaian komponen	tidak data ada penilaian komponen	27.19	28.07	28.07	27.87
2	Pengukuran kinerja			16.35	24.14	26.14	17.36
3	Pelaporan kinerja			10	13.58	13.58	14.95
4	Evaluasi internal			5.5	17.92	19.17	10.21
		73.82	79.40	72.52	83.71	86.96	70.39

Sumber : LHE AKIP Bapperida oleh Inspektorat Tahun 2020-2025

Berdasarkan data sandingan nilai komponen AKIP periode 2022-2025, komponen perencanaan kinerja bergerak stagnan dengan nilai



yang relatif konstan di kisaran 27–28 poin. Sementara itu, pelaporan kinerja menunjukkan tren positif yang konsisten, mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan teknis dalam penyusunan rencana dan penyajian laporan telah relatif baik dan stabil.

Penurunan kinerja pada tahun 2025 utamanya dipicu oleh kontraksi nilai pada dua komponen krusial, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi internal. Setelah mencapai puncak kinerja pada tahun 2024 masing-masing 26,14 dan 19,17, nilai kedua komponen ini jatuh secara tajam di tahun 2025 menjadi 17,36 dan 10,21.

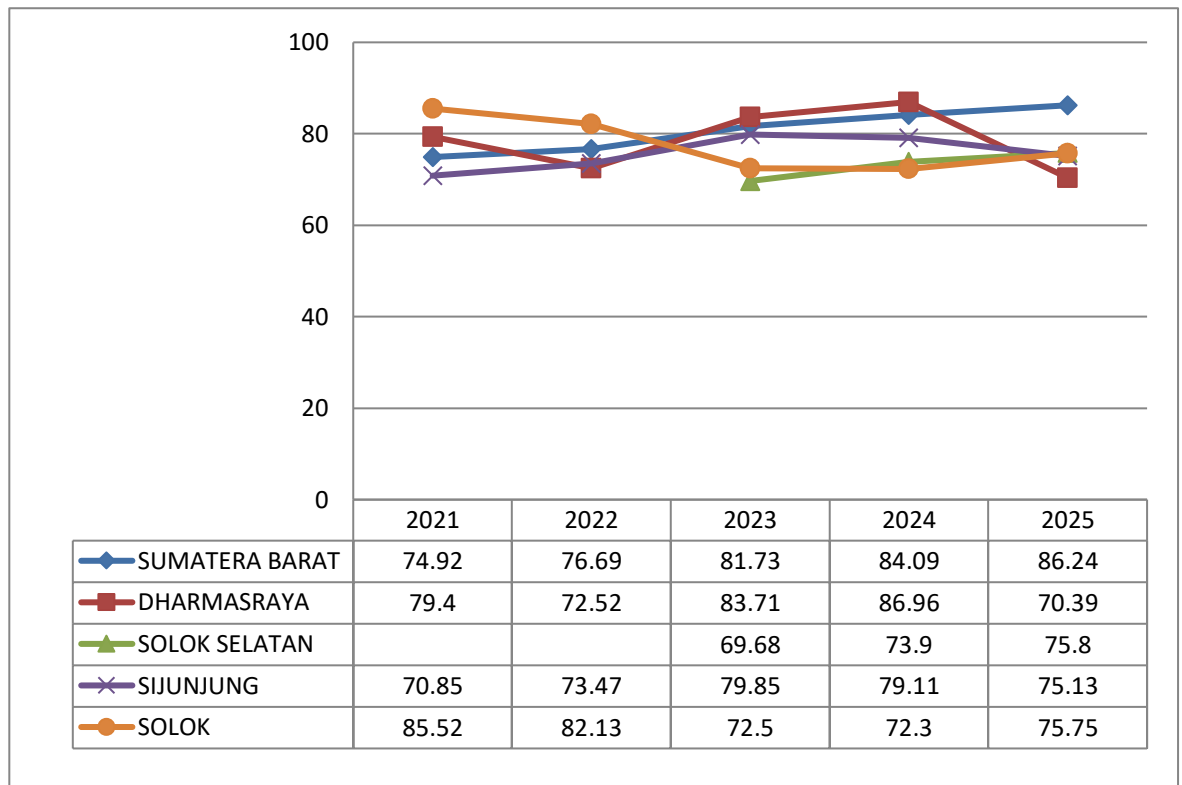
Penurunan total nilai AKIP pada tahun 2025 disebabkan oleh lemahnya penguatan pengawasan internal dan ketidakterukuran yang akurat terhadap capaian kinerja. Meskipun perencanaan dan pelaporan telah berjalan baik, namun hilangnya penguatan pada tahap monitoring (pengukuran) dan evaluating (evaluasi internal) menyebabkan akuntabilitas kinerja tahun 2025 tidak terkelola dengan optimal. Perlu ada strategi remedial khusus untuk memperbaiki kembali kualitas data pengukuran dan mekanisme evaluasi internal agar kembali mencapai kategori unggul seperti pada periode sebelumnya.

1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional/RPJMN serta Organisasi/Instansi sejenis yang setara/sekelas

Jika dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan karena tidak ada standar nasional untuk indikator ini. Sebagai alternatif perbandingannya adalah dengan membandingkan capaian indikator dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten tetangga sebagaimana grafik dibawah ini :



Grafik 3.3.5
Perbandingan AKIP Bapperida dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Lain



Sumber : Bagian Organisasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Bappelitbang Kab/Kota Tahun 2025

Berdasarkan data sandingan AKIP tahun 2021–2025, tren kinerja Bapperida Kab. Dharmasraya menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dan tidak konsisten dibandingkan dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat maupun kabupaten/kota tetangga.

Pada tahun 2023–2024, Bapperida Kab. Dharmasraya mencatatkan kenaikan performa yang impresif dengan nilai tertinggi di antara wilayah pembanding lainnya yaitu mencapai 86,96 pada tahun 2024. Namun, tren positif tersebut tidak mampu dipertahankan pada tahun 2025, di mana nilai AKIP Bapperida Kab. Dharmasraya mengalami penurunan drastis hingga 70,39. Sementara nilai AKIP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren kenaikan yang stabil dan konsisten dari tahun ke tahun, dari 74,92 di tahun 2021 menjadi 86,24 di tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan daerah tetangga, penurunan nilai Dharmasraya pada tahun 2025 merupakan yang paling tajam. Kabupaten Solok yang sempat menurun cukup dalam pada tahun 2023–2024 mulai menunjukkan tren pemulihan di tahun 2025 menjadi 75,75, begitu pula dengan Solok Selatan yang terus mengalami peningkatan, sedangkan Bapperida Kab. Dharmasraya mengalami regresi signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kualitas tata kelola dan pengukuran kinerja pada tahun 2025

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.3.37
Perbandingan Capaian Hasil Penilaian AKIP Bapperida dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Periode Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Kategori
			Target	Realisasi	%			
7	Hasil penilaian AKIP Bapperida	Indeks	A (81.48)	B (70.39)	86.39	A (82)	85.84	Sangat Baik

Sumber : Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, data diolah Bapperida Tahun 2026

Capaian kinerja indikator hasil penilaian AKIP Bapperida dengan capaian 86.39% menunjukkan hasil sangat baik jika disandingkan terhadap akhir Renstra. Jika disandingkan dengan capaian akhir Renstra maka AKIP Bapperida butuh evaluasi dan peningkatan strategi dalam peningkatan nilai komponen pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.

1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator dan Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja** upaya-upaya yang telah dilakukan guna mendorong terealisasinya target yang ditetapkan antara lain maka upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Perencanaan Kinerja

- Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Bapperida untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Bapperida.
- Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi kinerja yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi.
- Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja.
- Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang.
- Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dan tindak lanjut Rencana Aksi.
- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
- Membuat komitmen terkait peningkatan nilai AKIP Bapperida.
- Membuat mekanisme kebijakan *implementasi reward and punishment* melalui SK *Reward* dan *Punishment* Bapperida.

2. Pengukuran Kinerja

- Pemanfaatan e-SAKIP untuk pengumpulan data dan pengukuran kinerja.
- Melakukan riviui secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
- Pengumpulan data yang lengkap dan akurat

3. Pelaporan Kinerja

- Pelaporan kinerja sesuai rekomendasi AKIP Inspektorat, dengan penyajian menggunakan minimal 6 poin pembahasan disertai perbandingan dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat disertai analisis data yang akurat.



- Pelaporan kinerja menyajikan rumus, sumber perhitungan tingkat efisiensi serta pencantuman tiap sumber data yang valid dan lengkap.

4. Evaluasi Internal

- Melaksanakan Rapat Internal Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing bidang.

Faktor Penghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain : (a) belum optimalnya pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja masih dalam rangka pelengkapan administratif pada penyusunan SKP diakhir tahun, (b) setiap individu telah memiliki perjanjian kinerja tapi belum berkomitmen atau memahami kinerja yang akan dicapainya (c) masih adanya egosentris bidang dalam pengumpulan data kinerja. Sebagai langkah menyikapi kondisi ini sosialisasi secara terus menerus guna peningkatan dan penguatan komitmen dari seluruh ASN di lingkungan Bapperida berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan serta evaluasi berkala secara periodik atas capaian kinerja sebagai acuan untuk perencanaan berikutnya serta pendekatan persuasif dalam pengumpulan data kinerja.

1.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

- a. Analisis sumber daya manusia serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan capaian terhadap empat komponen AKIP maka bahwa alokasi kapasitas SDM dan dukungan anggaran cenderung difokuskan secara berlebihan pada tahap perencanaan (nilai stabil tinggi ~28,00) dan pelaporan (nilai meningkat hingga 14,95). Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya organisasi banyak terserap untuk urusan administratif, format laporan, dan persiapan dokumen perencanaan.

Penurunan drastis nilai pengukuran kinerja dan evaluasi internal pada tahun 2025 menunjukkan adanya *bottleneck* pada manajemen

sumber daya di fase operasional. Sumber daya yang tersedia tidak cukup atau tidak kompeten untuk melakukan monitoring intensif serta audit internal berkualitas. Fungsional pengawas internal dan analisis data mengalami kelebihan beban kerja dan kurangnya dukungan teknis sehingga fungsi pengendalian ini menjadi titik lemah.

Disamping itu kontraksinya nilai pengukuran kinerja menjadi 17,36 dan evaluasi internal mengindikasikan absennya sistem informasi kinerja berbasis dashboard yang terintegrasi. Pengolahan data kinerja masih dilakukan secara manual, sporadis, dan rentan kesalahan manusia (human error). Tanpa sistem IT yang mampu merekam capaian kinerja secara real-time dan otomatis, validitas data menjadi lemah ketika dievaluasi di akhir periode.

b. Efisiensi anggaran

Untuk menghitung tingkat efisiensi, digunakan perhitungan tingkat efisiensi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021.

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA * CK\%) - RA}{PA} \times 100\%$$

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja %, nilai maksimal yang dihitung adalah 120%

RA : Realisasi Anggaran

Nilai tertinggi efisiensi 20% dan nilai terendah -20%



Tabel 3.3.38

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Hasil Penilaian AKIP Bapperida

No	Indikator	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi	Keterangan
7	Hasil penilaian AKIP Bapperida	3,420,081,581	3,314,499,225	86.39	-10.52%	Tidak Efisien

Sumber : Fungsional Bapperida Tahun 2025



Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,39% dengan tingkat efisiensi -10.52% dengan anggaran sebesar Rp. 3,367,606,150,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,222,609,937,- atau sebesar 96.91%.

Tidak efisiensinya anggaran pada indikator ini dikarenakan sebagian anggaran digunakan untuk kegiatan bersifat administratif dan rutin serta masih kurangnya pemanfaatan terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya .

c. Analisis Program/kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) subkegiatan yaitu :

- 1 Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Administrasi umum Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perjanjian kinerja Bapperida pada tahun 2025 sebesar Rp. 4,198,594,710,- atau sebesar 97.16% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4,321,239,481,-Anggaran tersebut tersebar di 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

3.4.1 Capaian Realisasi Anggaran Per-Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

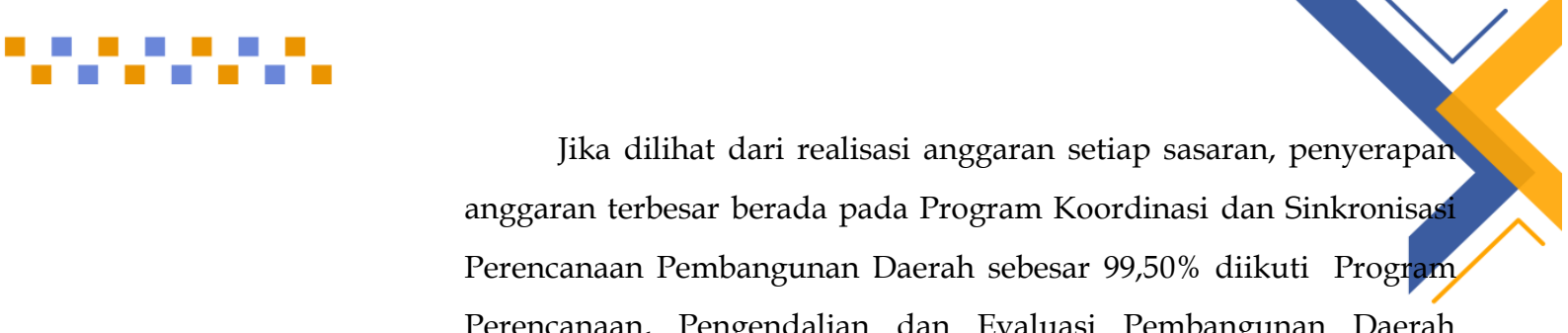
Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Melalui dukungan anggaran pada 4 (empat) program sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran sebesar Rp. 4,321,239,481,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4,198,594,710,- (96,17%).

Tabel 3.3.38
Anggaran dan Realisasi Anggaran per-Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Rata-rata Capaian Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025			Rata-rata Capaian Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Indikator			Pagu (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD	95	104.09	109.57	95.38	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577,750,750	574,706,648	99.47	99.49
		Rata-rata capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	95	93.98	98.93						
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	95	83.78	88.19						
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25	22.85	91.40						
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	22	19.54	88.82						
2	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/Indeks Government Award	Sangat inovatif (75)	66.80 (Sangat Inovatif)	89.07	89.07	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	205,000,000	192,140,271	93.73	93.73

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025			Rata-rata Capaian Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025			Rata-rata Capaian Anggaran
			Target	Realisasi	Capaian Indikator			Pagu (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai Akip Bapperida	A (81.48)	A (70.39)	86.39	86.39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,420,081,581	3,314,499,225	96.91	96.91
Capaian Kinerja						94.46	Capaian Anggaran	4,321,239,481	4,198,594,710		97.16

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Data Diolah Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2026



Jika dilihat dari realisasi anggaran setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 99,50% diikuti Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar ebesar 99,47%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,91% dan terakhir Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 93,73%.

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran sebesar 94,46% dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik sebesar 97,16% atau mendekati angka 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 relatif telah mencukupi.

Dari sisi efisiensi anggaran, anggaran Bapperida tahun 2025 tergolong **tidak efisien**, dengan anggaran sebesar Rp. 5.034.726.850,- dan realisasi sebesar Rp. 4,812,004,423,- dimana untuk mencapai pencapaian sasaran kinerja Bapperida sebesar 94,46% angka efisiensi Bapperida sebesar -2,70%.

3.5 INOVASI DAN PENGHARGAAN

3.5.1 Inovasi

Berdasarkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/123/KPTS-BUP/2025 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ada 103 Inovasi yang ditetapkan pada tahun 2025. Salah satu inovasi Bapperida yang ditetapkan dalam keputusan tersebut adalah "**JARI MANIS** (Jaringan Pengembangan Inovasi Dharmasraya). Program inovasi strategis yang diluncurkan pada 10 April 2025 sebagai wadah sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi inovasi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi yang diluncurkan pada 10 April 2025 sebagai wadah sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi

inovasi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Inovasi ini berhasil mengantarkan Kab. Dharmasraya meraih predikat Sangat Inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah. Tujuan dari inovasi ini menggerakkan inovasi lintas sektor agar tidak hanya menjadi ide, tetapi benar-benar diimplementasikan dan berdampak bagi masyarakat. Dengan fokus pada pendampingan, asistensi, dan fasilitasi berkelanjutan kepada setiap perangkat daerah untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Gambar 3.5.1.1 Inovasi Jari Manis



Sumber : Dokumentasi Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

3.5.2 Penghargaan

Penghargaan yang diterima Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yaitu Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif Tahun 2025 tingkat Nasional dan Terbaik II Indeks Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Se-Sumatera Barat :

Gambar 3.5.2.1
Piagam Penghargaan Kabupaten Sangat Inovatif





Sumber : Dokumentasi Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025

Gambar 3.5.2.1
Piagam Penghargaan Kabupaten Terbaik II Tingkat Kabupaten Se-Sumatera Barat



Sumber : Dokumentasi Bapperida Kab. Dharmasraya Tahun 2025



Penghargaan sebagai **Kabupaten Sangat Inovatif** ini merupakan penghargaan kedua bagi Kabupaten Dharmasraya setelah mengikuti ajang ini terhitung tahun 2020. Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi kolaborasi Pemerintah Daerah bersama semua pihak yang telah menerapkan budaya inovasi untuk menyelesaikan persoalan, serta kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan dukungan penuh masyarakat Dharmasraya.



BAB IV



PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025, secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan dari 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat direalisasikan dengan kategori **sangat baik**. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2025 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Catatan rekomendasi dari Hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2025 oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya sudah ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2025.
2. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatkan Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator Capaian Sasaran RPJMD terealisasi sebesar 109,57% berada pada kategori capaian yang **memuaskan**, Rata-Rata Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah terealisasi sebesar 98,93%, Rata-Rata Capaian Kegiatan/Subkegiatan dengan realisasi kinerja 88,19%, Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 91,40%, Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 88,82%, dengan capaian **sangat baik**.
3. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah/*Indeks Government Award* terealisasi sebesar 89,07% dengan kategori capaian kinerja **sangat baik**.
4. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapperida dengan indikator Nilai AKIP Bapperida terealisasi sebesar 86,39% dengan capaian **sangat baik**.

- 
- 
5. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tugas Bapperida Kab. Dharmasraya untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4,321,239,481,- direalisasikan sebesar Rp 4,198,594,710,- dalam mencapai rata-rata kinerja Bapperida sebesar 94,46% dengan angka efisiensi penggunaan anggaran sebesar -2,70%.
 6. Ini menunjukkan capaian sasaran belum optimal, yang berarti bahwa Bapperida Kab. Dharmasraya harus berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah dalam urusan perencanaan dan riset dan inovasi daerah.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

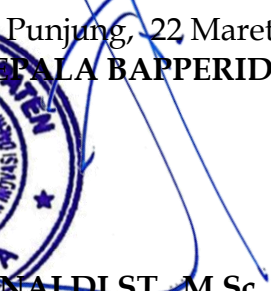
Sejumlah permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Bapperida Kabupaten Dharmasraya dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi perlu diupayakan untuk memperkuat peran kelembagaan Bapperida Kabupaten Dharmasraya.

Berikut beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya adalah:

- 1) Perlu adanya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bapperida Kab. Dharmasraya;
- 2) Reviu dan penajaman indikator sasaran agar lebih mencerminkan outcome pembangunan dan mengurangi bias capaian substitusi antar indikator.
- 3) Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran agar seluruh program mendukung capaian sasaran RPJMD, Renstra dan Renja OPD.
- 4) Mempertajam cascading kinerja RPJMD ke Renstra , perjanjian kinerja, hingga level individu.

- 5) Memastikan setiap indikator memiliki target yang realistis, terukur dan berbasis data.
- 6) Melakukan evaluasi berkala pertriwulan untuk mengidentifikasi deviasi capaian dan segera melakukan korektif.
- 7) Meningkatkan kapasitas perencana, baik internal Bapperida maupun Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan.
- 8) Penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) agar memenuhi prinsip SMART.
- 9) Memperkuat ekosistem inovasi melalui pembinaan, kompetisi inovasi serta replikasi inovasi yang berhasil.
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi internal melalui reviu kinerja yang lebih mendalam dan analitis.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel. Laporan ini juga diharapkan menjadi media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung, 22 Maret 2026
KEPALA BAPPERIDA,

PRINALDI ISTIKOM, M.Sc
NIP. 19751205 200501 1 004



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN RISET INOVASI DAERAH
Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung Telp. (0754) 40319 Fax (0754) 40332

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PARYANTO, S.Sos., M.T**
Jabatan : **KEPALA BAPPERIDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama .


Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE., M. AP**
Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE., M.AP

Pulau Punjung, Januari 2025

PARYANTO, S.Sos., M.T
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19690609 198902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH**


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD	95
		Rata-rata capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah	95
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	95
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	22
2	Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/Indexs Government Award	Sangat inovatif (75)
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP BAPPERIDA	A (81,48)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.956.919.000,-	DAU-APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	768.719.350,-	DAU
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	251.007.000,-	DAU
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	500.000.000,-	DAU PERUNTUKAN BIDANG PENDIDIKAN
	Jumlah	5.476.645.350,-	

Pulau Punjung, 2025



PIHAK KEDUA,
SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE., M.AP



PIHAK PERTAMA,
PARYANTO, S.Sos., M.T
 Pembina Utama Muda/ IV.c
 NIP. 19690609 198902 1 001

PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023			Capaian Kinerja Tahun 2024			Capaian Kinerja Tahun 2025			Target Akhir Periode Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Program	Anggaran	
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%				Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian sasaran RPJMD	%	90	105.30	117.00	95.00	100.64	105.94	95.00	104.09	109.57	95	91.27	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	696,157,900.00	691,955,214.00
		Rata-rata capaian Renstra PD	%	90	102.69	114.10	95.00	102.21	107.59	95.00	93.98	98.93	95	101.09			
		Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	Peringkat	90	97.21	108.01	95.00	91.80	96.63	95.00	83.78	88.19	95	113.39	2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	118,407,150.00	117,248,566.00
		Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja	Bobot	22	22.28	101.27	24.00	22.75	94.79	25.00	22.85	91.40	26	113.79			
		Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja	Bobot	19	18.64	98.11	21.00	19.54	93.05	22.00	19.54	88.82	23	117.71			
2	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Kebijakan dan pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah/ Indexs Government Award	Bobot/ indeks	65	57.84	88.98	72.50	63.12	87.06	75.00	66.8	89.07	80	119.76	3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	205,000,000.00	192,140,271.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penilaian AKIP Bappppeda	Bobot/ indeks	BB	BB	90.74	A	A	107.41	A	BB	86.39	A	86.39	4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,420,081,581.00	3,314,499,225.00
				79.92	72.52	80.96	86.96	81.48	70.39	82							
Rata-rata capaian Bapperida				65.13	68.07	104.51	69.07	69.57	100.736	69.78	65.92	94.46		Jumlah	4,321,239,481.00	4,198,594,710.00	



Dharmasraya, 22 Maret 2025
BAPPERIDA,

ALDI ST., M.Sc

NIP. 19751205 200501 1 004



KABUPATEN DHARMASRAYA
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN 1s/d 4 TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target/Realisasi		Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Paraf Hierarki				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian sasaran RPJMD	95.00	104.09	109.57	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100	95.00									
			Rata-rata capaian sasaran Renstra PD	95.00	93.98	98.93		Persentase pencapaian hasil RPJMD	95.00	104.09									
			Rata-rata capaian kegiatan/subkegiatan	95.00	83.78	88.19													
			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	25	22.85	91.40													
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	22	19.54	88.82													
				Penyusunan RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025-2029, RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 berbasis data sektoral dan hasil evaluasi tahun sebelumnya	3 dokumen	2 dokumen			Koordinasi penyempurnaan penyusunan RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2025-2029, RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025, Renstra OPD dan Renja OPD berbasis Data	5 dokumen	3 dokumen								
											Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang tersusun secara lengkap dan tepat waktu	3 dokumen	2 dokumen					
													Penyusunan Tim Penyusun RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD	5 SK	2 SK				
													Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, RKPD	3 dokumen	2 dokumen				
									tw 1-2 Sosialisasi time line kegiatan perencanaan tahun 2025	1 SE			tw 1-2 Penyusunan kalender perencanaan tahun 2025	1 SE					
									tw 1-2 Koordinasi verifikasi dan validasi POKIR DPRD ke OPD terkait	37 OPD			tw 1-2 Permintaan Pokok Pikiran DPRD	30 orang DPRD	347 usulan				
													tw 1-2 Verifikasi dan validasi usulan musrenbang nagari sesuai kewenangan dan OPD terkait	52 nagari	595 usulan				
				tw 1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD	2 kegiatan	1 kegiatan	Meningkatnya perencanaan yang partisipatif	Persentase hasil musrenbang kecamatan dan stakeholder yang sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan	40%		Terlaksananya musrenbang kabupaten/kota	Persentase kecamatan yang mengumpulkan usulan dan berita acara musrenbang kecamatan tepat waktu	100%	100%					
									tw 1 Musrenbang RKPD, RPJMD	2 kegiatan	1 kegiatan		tw1 Verifikasi dan validasi usulan musrenbang kecamatan sesuai kewenangan dan OPD terkait	2 usulan/nagari	575 usulan				
				tw 1-3 Penguatan integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan (RPJMD-dengan RPJMN, RKPD Provinsi, RKPD-dengan RPJMD, Renstra dengan RPJMD, Renja dengan RKPD, Renja dengan Renstra OPD)	5 dokumen	3 dokumen	Meningkatnya keselarasan perencanaan antar dokumen perencanaan		tw 2-4 Sinkronisasi penyusunan RPJMD-RPJMN-RPJMD Prov. Sumbar, Renstra-RPJMD-Renstra Prov Sumbar, RKPD-RPJMD-, Renja-RKPD, Renja-Renstra PD, Renja- Renja Prov Sumbar	5 dokumen			tw 2 Verifikasi dan Asistensi Rancangan Renja OPD setelah Musrenbang RKPD	37 OPD	37 OPD				
													tw 2-3 Integrasi/Sinkronisasi perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJMD-RPJMN-RPJMD Prov. Sumbar, Renstra-RPJMD-Renstra Prov Sumbar, RKPD-RPJMD-, Renja-RKPD, Renja-Renstra PD, Renja-Renja Prov Sumbar)	5 dokumen	5 dokumen				
													tw 2-3 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, RKPD, Renstra, Renja OPD	5 dokumen	5 dokumen				

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target/Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Paraf Hierarki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
												tw 2-3	Reviu Rancangan Akhir RPJMD, P RKP, RKP oleh Inspektorat	3 dokumen	3 dokumen								
								tw 2-3	Koordinasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD, RKP berdasarkan hasil Reviu Inspektorat			tw 2-3	Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD, RKP berdasarkan hasil Reviu Inspektorat	3 dokumen	3 dokumen								
								tw 2-3	Koordinasi penyempurnaan RPJMD berdasarkan hasil fasilitasi RPJMD dan RKP oleh Provinsi Sumatera Barat			tw 2-3	Fasilitasi RPJMD dan RKP oleh Provinsi Sumatera Barat	3 dokumen	3 dokumen								
								tw 2-4	Koordinasi penyempurnaan RPJMD, RKP berdasarkan hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Ranperda RPJMD, Ranperbup RKP			tw 2-3	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Ranperda RPJMD, Ranperbup RKP	3 dokumen	3 dokumen								
												tw 3-4	Penetapan RPJMD, RKP, P RKP	3 dokumen	3 dokumen								
								tw 3-4	Koordinasi verifikasi Rancangan Akhir, Renstra, Renja Perangkat Daerah			tw 3-4	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra, Renja Perangkat Daerah, P Renja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen								
								tw 3-4	Koordinasi penyempurnaan Renstra, Renja PD berdasarkan hasil Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Ranperbup Renstra, dan Ranperbup Renja OPD			tw 3-4	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi terhadap Ranperda RPJMD, Ranperbup Renstra, RKP, dan Ranperbup Renja OPD	5 dokumen	5 dokumen								
												tw 3-4	Penetapan Renstra, Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah	3 dokumen	3 dokumen, dalam proses administrasi harmonisasi								
				tw 1-2	Sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi	5 dokumen	3 dokumen	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan dengan nasional, provinsi	tw 1-2	Merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan prioritas nasional dan provinsi	5 dokumen	3 dokumen	Terlaksananya sinergi perencanaan dengan nasional dan provinsi	Jumlah kegiatan prioritas (proyek prioritas yang dibiayai APBN yang selaras dengan pencapaian sasaran Prioritas Nasional(PP, KP, proyek prioritas)	5 dokumen	2 dokumen							
								tw 1-2	Analisis gap dan pemetaan program prioritas nasional/Provinsi dengan daerah			tw 1-2	Mengidentifikasi kesesuaian kebijakan sesuai dengan prioritas nasional dan provinsi	3 dokumen	3 dokumen								
												tw 1-3	Pendampingan teknis OPD dalam penyusunan Renja sesuai prioritas nasional	2 dokumen	1 dokumen								
				tw 1-4	Peningkatan kualitas basis data perencanaan dan evaluasi	SATU DATA	SATU DATA	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dalam Satu Data Indonesia (SDI)	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	tw 1-2	Koordinir Rakor SDI (Satu Data Indonesia)	37 OPD	37 OPD	Tersedianya data, analisis data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	1 dokumen						
												tw 1-2	Desk Pendampingan pengumpulan data	37 OPD	37 OPD								
												tw 1-2	Verifikasi kecukupan data penyusunan RKP	37 OPD	37 OPD								
				tw 1-4	Monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah	5 dokumen	3 dokumen			tw 1-2	Penyusunan agenda kebijakan tahunan daerah	3 dokumen	2 dokumen	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah	5 dokumen	3 dokumen						
												tw 1-3	Review internal Bapperda terhadap konsistensi dengan RPJMD, RKP, dan regulasi	3 dokumen	2 dokumen		tw 1-2	Pengumpulan data dan penyusunan kajian awal kebijakan	37 OPD	37 OPD			
												tw 2-3	Finalisasi RPJMD, RKP, P RKP dan harmonisasi lintas bidang	3 dokumen	3 dokumen		tw 1-2	Konsolidasi isu strategis dan kebutuhan lintas OPD melalui forum teknis	2 kegiatan	1 kegiatan			
												tw 2-3	Penyampaian kebijakan kepada Kepala Daerah dan DPRD	3 dokumen	3 dokumen								
				tw 1-4	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah	95%	4 x			tw 1-4	Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi program strategis	4 x	4 x		Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah	4 laporan	1 laporan						

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target/Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Paraf Hierarki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
												tw 1-4 Evaluasi capaian dan deviasi	4 laporan	1 laporan	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target/Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Paraf Hierarki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				tw 1-4 Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah	95%	13.43%		tw 1-4 Mengintegrasikan hasil evaluasi dan indikator capaian pembangunan tahun sebelumnya dalam perencanaan lima tahunan/tahunan.	5 dokumen	3 dokumen	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah	4 laporan	1 laporan		
												tw 1-4 Validasi hasil movev dengan OPD	4 laporan	4 laporan	
												tw 1-4 Penyusunan laporan movev pelaksanaan RKPD Tahun 2025	4 laporan	4 laporan	
												tw 1-3 Penyusunan laporan movev pelaksanaan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2020-2025	2 laporan	2 laporan	
								tw 2-tw 3 Koordinasi review dan harmonisasi indikator kinerja daerah dan OPD	37 OPD	37 OPD		tw 2-tw 3 Telaah Keselarasan Indikator Kinerja Daerah dengan OPD	37 OPD	37 OPD	
												tw 2-tw 3 Konsultasi internal dengan OPD Terkait	37 OPD	37 OPD	
				tw 1-3 Penguatan kapasitas SDM perencana melalui Bimtek/Workshop	4 x	1 sosialisasi		tw 2-4 Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk ASN Bappeta terkait teknik penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD)	>2 x, ASN Terlatih (>85%), Peningkatan skor tes (>80%)	6x		tw 2-4 Bimtek penyusunan Renstra/Renja	2 x/ skor tes keterampilan perencana >80	6x	
								tw 1-3 Sosialisasi penyusunan Renstra/Renja OPD	6 kali	8 kali		tw 1-3 Sosialisasi penyusunan Renstra/Renja OPD	6 kali	3 kali	
2		Meningkatnya fungsi litbang dalam mendukung kebijakan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah/Index Government Award	Sangat inovatif (72.5)	Sangat Inovatif 66.8	89.07	Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah/Index Government Award	72.5		Meningkatnya kualitas inovasi PD yang diusulkan	Jumlah inovasi PD yang lolos verifikasi sesuai ketentuan	70 inovasi	63 inovasi	
												Jumlah inovasi PD yang dipublikasikan	70 inovasi	63 inovasi	
				tw 1 Penyusunan SK Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	1 SK	1 SK		tw 1 Mengkoordinasikan penyusunan SK Inovasi	1 SK	1 SK		tw 1 Menghimpun inovasi OPD yang akan dilaksanakan Tahun 2025	37 OPD dan 15 Puskesmas	104 inovasi	
				tw 3 Penyusunan Rencana Aksi Inovasi Daerah	1 Dokumen			tw 3 Review internal dan harmonisasi substansi Rencana Aksi Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen		tw 3 Penyusunan Draft RAD Inovasi Daerah	1 dokumen	0	
				tw 3 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya	1 Perbup			tw 3 Sosialisasi Perbup tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya ke Puskesmas, 2 RSUD	1 kali/37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD	1X		tw 1 Membuat draft SK Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025	1 SK	1 SK	
				tw 2 Penyusunan PKS dengan mitra inovasi untuk replikasi inovasi	3 PKS			tw 2 Mengkoordinasikan kebutuhan kerjasama (PKS)	3 PKS	3 PKS		tw 2 Pemetaan Inovasi yang dilakukan kebutuhan PKS	3 PKS	3 PKS	
				tw 1 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang Inovasi Daerah bagi OPD	37 OPD dan 15 Puskesmas			tw 2 Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek ke OPD dan stakeholder	33 kali (sosialisasi dan monitoring berjalan bersamaan)	8 kali		tw 2 Coaching desk inovasi dengan OPD pengampu	37 OPD dan 15 Puskesmas	22 OPD, 15 UPT	
				tw 1-2 Pengumpulan dan Verifikasi Usulan Inovasi tahun 2023-2024 dari OPD	77 inovasi			tw 3-4 Supervisi penginputan inovasi ke aplikasi IGA Kemendagri dan review akhir	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD	1 laporan		tw 1 Menghimpun inovasi dan kelengkapan inovasi OPD Tahun 2023 dan 2024 yang akan dilaporkan ke Kemendagri dalam rangka Penilaian IGA Tahun 2025	75 inovasi	77 inovasi	
				tw 2 Pendampingan OPD dalam Penyusunan Narasi dan Bukti Dukung Inovasi	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD			tw 2-3 Mengkoordinir tim dalam pengumpulan dan kurasi dokumen/foto/video inovasi	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD	1 laporan		tw 3 Verifikasi dan validasi inovasi tahun 2023 dan 2024	37 OPD dan 15 Puskesmas	13 OPD, 8 UPT	
				tw 1-4 Monitoring & Evaluasi Inovasi OPD	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD			tw 1-4 Diseminasi dan penyusunan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi inovasi	4 laporan	1 laporan	Terlaksananya movev inovasi yang berkualitas	tw 1-4 Monitoring dan Evaluasi inovasi ke OPD terkait	4 laporan	1 laporan	
				tw 3 Penyelenggaraan Kompetisi/Lomba Inovasi Antar OPD	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD			tw 2 Mengkoordinasikan pengumpulan inovasi dari OPD dan melakukan validasi awal	37 OPD dan 15 Puskesmas, 2 RSUD	13 OPD, 8 UPT		tw 2-3 Penginputan inovasi ke aplikasi IGA	1 kali/ OPD pengampu inovasi	3 kali	
				tw 2-3 Pengumpulan dan Kurasi Bukti Dukung untuk SIDDA (foto, video, dokumen)	OPD			tw 3 Fasilitasi/koordinasi pelaksanaan kompetisi inovasi antar OPD	3 kategori	3 kategori		tw 2 Monitoring dan Evaluasi terhadap kelengkapan dokumen inovasi yang diinput ke aplikasi IGA Kemendagri	37 OPD dan 15 Puskesmas	13 OPD, 8 UPT	
				tw 3 Input dan Review Data Indeks Inovasi Daerah melalui SIDDA Kemendagri	OPD			tw 1-4 Evaluasi internal dan menyampaikan hasil ke pimpinan	4 laporan	4 laporan		tw 3 Verifikasi Inovasi OPD kompetisi inovasi antar OPD	1 kali	3 kali	
				tw 3-4 Penyusunan dan Penerbitan Katalog Inovasi Daerah Tahun 2025	1 katalog video web Bannemida			tw 3-4 Penyusunan dan Penerbitan Katalog Inovasi Daerah Tahun 2025	1 katalog video web Bannemida			tw 4 Penyusunan laporan rekapitulasi inovasi OPD	1 laporan	1 laporan	
				tw 4 Evaluasi dan Review Internal Capaian Inovasi Daerah	37 OPD dan 15 Puskesmas			tw 4 Evaluasi dan Review Internal Capaian Inovasi Daerah	37 OPD dan 15 Puskesmas	13 OPD, 8 UPT					

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target/Realisasi	Capaian	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Paraf Hierarki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				tw 4 Penyampaian Laporan Akhir dan Publikasi Hasil Capaian IID 1 Dokumen				tw 4 Penyampaian Laporan Akhir dan Publikasi Hasil Capaian IID 1 Dokumen	1 Dokumen					
3		Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Bappeda	A (81.40) 70.39	86.39									
				tw 2-4 Sinkronisasi Renstra Bappeda dengan RPJMD, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat. 1 dokumen		Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi	Nilai komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP	tw 2-4 Riview dan validasi IKU 2 dokumen	2 dokumen					
				tw 2-4 Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) agar SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 1 dokumen				tw 2-4 Rakor antar bidang 2x	3 kali	Perencanaan kinerja yang berkualitas dan terukur	Persentase kesesuaian IKU dengan Renstra dan RPJMD	tw 2-4 Sinkronisasi IKU dengan RPJMD, Renstra 2 dokumen	2 dokumen	
								tw 2-4 Revisi dan penyesuaian Renja bidang/subbidang sesuai Renstra & IKU Bapperida 2 dokumen	2 dokumen			tw 2-4 Penyusunan IKU SMART 1 dokumen	1 dokumen	
				tw 2-4 Menyusun cascading kinerja dari RPJMD ke Renstra, Renja, hingga SKP 1 cascading		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja organisasi	Nilai komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP	tw 2-4 Konsolidasi penyusunan Renja dan RKA 2 dokumen	2 dokumen	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	Persentase keselarasan antara Renja, RKA, dan DPA	tw 1-4 Integrasi, sinkronisasi perencanaan (Renja) dan RKA, DPA Bapperida 4 dokumen	1 dokumen	
				tw 2-4 Sosialisasi keterkaitan antara target individu dengan target organisasi. 3 kali				tw 2-4 Koordinasi Penyusunan cascading dan pohon kinerja Bapperida 2 laporan	2 laporan			tw 2-4 Penyusunan Renja dan cascading IKU 2 laporan	2 laporan	
												tw 2-3 Sinkronisasi cascading dengan SKP ASN Bapperida 1 cascading	1 cascading	
				tw1-tw4 Melakukan evaluasi capaian kinerja triwulan dan tahunan secara berkala. 2 kali				tw 1-4 Monitoring triwulan evaluasi hasil kinerja per-bidang 4 laporan	4 laporan	Monitoring dan evaluasi kinerja yang efektif	Jumlah laporan kinerja triwulan dan tahunan sesuai format	tw 1-4 Monitoring realisasi kinerja triwulan 4 laporan	4 laporan	
				tahunan Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-SAKIP/e-kinerja. 4 tw				tw 1-4 Fasilitasi pelatihan teknis penggunaan e-SAKIP 1 x	1 x			tw 1-4 Pengisian data aplikasi e-SAKIP secara lengkap 3 sasaran	-	
				tw 1 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara tepat waktu dan akurat. 1 laporan		Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi	Nilai komponen pelaporan pada evaluasi SAKIP	tw 1 Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara tepat waktu dan akurat. 1 laporan	1 laporan	Pelaporan akuntabilitas kinerja yang akurat dan tepat waktu	Nilai evaluasi internal atas LKJIP	tw 1 Review internal LKJIP sebelum dikirim ke evaluator 1 laporan	1 laporan	
										SDM eselon IV memahami dan menginternalisasi SAKIP	Persentase pegawai mengikuti pelatihan SAKIP	tw 1-4 Rutin internalisasi SAKIP melalui briefing 4 x	1x	
							Jumlah pejabat administrator yang mengikuti bimtek SAKIP	Tahunan Fasilitasi pelatihan SAKIP 2x	2x			tw 3-4 Penunjukan agen perubahan unit kerja 1 org/bidang	0	
				tw 3-4 Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi evaluator 1 laporan		Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Nilai komponen evaluasi internal pada evaluasi SAKIP	tw 3-4 Menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi evaluator 1 laporan	1 laporan	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya	Persentase rekomendasi evaluator yang ditindaklanjuti	tw 3-4 Penyusunan matriks tindak lanjut SAKIP 1 laporan	1 laporan	
				tw3 Supervisi dan asistensi SAKIP oleh tim evaluasi internal 5 bidang				tw 1-4 Monitoring berkala oleh Tim SAKIP internal 4 laporan	4 laporan			tw 1-4 Melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan SAKIP secara berkala 4 kali	4 kali	
				tahunan Bimbingan teknis dan pelatihan SAKIP 3 x				tw 1-3 Bimtek SAKIP dan manajemen kinerja 3 x	2x			tw 1-3 Bimtek SAKIP dan manajemen kinerja 2x	1x	
				tahunan Knowledge sharing antar OPD yang telah meraih nilai SAKIP tinggi dan antar Kab/Kota 1x				tahunan Rapat koordinasi dengan OPD terbaik SAKIP 1x				tw 3-4 Penyusunan rencana tindak lanjut koordinasi SAKIP serta implementasi 1 laporan	1 laporan	
				tw 2-4 Mengintegrasikan inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan pelaporan. 2 Inovasi				tw 2-4 Identifikasi inovasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja 1 inovasi	1 inovasi			tw 2-4 Identifikasi inovasi yang relevan dengan tupoksi unit kerja 1 inovasi	1 inovasi	